

**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(IPM), PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENGANGGURAN
TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA (2013-2017)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Ekonomi Syariah



Oleh:

U. SULIA SUKMAWATI

NIM: 1600108017

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI S-2 EKONOMI SYARIAH

UIN WALISONGO SEMARANG

2018

Persembahan

Kupersembahkan karya kecil ini untuk:

Orangtuaku:

*U. Solihin & Hj. Mahlia Rasmi
Umumhan & Inna Herawati*

Suamiku tersayang

Reza Akbar, S.Si, M.H.

Kedua buah hatiku:

Naira Adzkia Akbar & Daud Adzka Akbar

Saudara-Saudaraku:

*Urai Dewi Erlianti, S.Pd, Uray Tri Zahroh Nabila,
Desy Rosaline, SP., Fitri Yulianti, S.H., Vima
Pablina, S.P, Vina S.Pd*

Para Guru dan Dosen, serta Para Sahabat

MOTTO

“Semangat belajar hingga tutup usia”

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **U. Sulia Sukmawati**
NIM : 1600108017
Judul Penelitian : **Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia (2013-2017)**
Program Studi : S-2 Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia (2013-2017)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 10 Juli 2018

Pembuat Pernyataan,

U. Sulia Sukmawati
1600108017





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454. 70774414


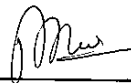

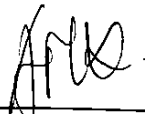
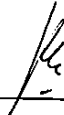

FTM-20A

**PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : U. Sulia Sukmawati
NIM : 1600108017
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Konsentrasi : BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH
Judul : ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM),
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN TERHADAP
KEMISKINAN DI INDONESIA (2013-2017)

telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan penguji pada saat Ujian Tesis yang telah dilaksanakan pada 3 Juli 2018

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Dr. H. Ahmad Furqon, M.Ag</u> Ketua/Penguji	<u>9/7/2018</u>	
<u>Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag</u> Sekretaris/Penguji	<u>8/7 2018</u>	
<u>Dr. H. Ali Murtadho, M.Ag</u> Pembimbing/Penguji	<u>9/7 2018</u>	
<u>Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, M.Si</u> Penguji	<u>9/7 2018</u>	
<u>Prof. Dr. Hj. Siti Mulibatun, M.Ag</u> Penguji	<u>6-7-2018</u>	
<u>Dr. H. Muhlis, M.Si</u> Penguji	<u>6/7-18</u>	

NOTA DINAS

Semarang, 28 Juni 2018

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : U. Sulia Sukmawati
NIM : 1600108017
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah
Judul Penelitian : **Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia (2013-2017)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP: 197108301998031003

NOTA DINAS

Semarang, 28 Juni 2018

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

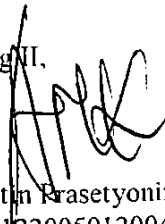
Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **U. Sulia Sukmawati**
NIM : 1600108017
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah
Judul Penelitian : **Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia (2013-2017)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, M.Si
NIP. 97905122005012004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṡā'	Ṡ	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik dibawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Ẓā'	Ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-

ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Sya'ādah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

C. Tā' Marbūṭah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fītri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (ˉ) di atasnya
2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāw mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مَوْئِدٌ : ditulis mu'annas

G. Kata Sandang Alief + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآنُ : ditulis al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الْتَبِيعَةُ : ditulis asy-syi'ah

H. Huruf Besar

Pemulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis syaikh al-Islām atau syaikhul-Islām

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia (2013-2017)

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang harus diminimalisir karena dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. Islam memandang bahwa kemiskinan dapat membahayakan jiwa dan iman sehingga dianggap mendekati kekufuran. Berdasarkan teori-teori yang ada dan beberapa penelitian yang telah dilakukan, masalah kemiskinan umumnya berkaitan dengan faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi secara langsung terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tidak langsung IPM dan pertumbuhan ekonomi melalui pengangguran dalam memengaruhi tingkat kemiskinan. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan sampel 33 provinsi di Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Panel data yang digunakan yaitu data *time series* rentang waktu 2013-2017 dan *cross section* dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam analisis yaitu *path analysis* dengan bantuan *software* WarpPLS 5.0 untuk pengolahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM secara langsung berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien jalur -0.71 . Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dengan nilai probabilitas 0.23 . Kemudian, tampak pula bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien jalur 0.14 dan berpengaruh signifikan dengan probabilitas 0.035 . Penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran dapat memediasi IPM dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga dapat memediasi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Kata Kunci: IPM, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan

Analysis of Influence of Human Development Index (HDI), Economic Growth, and Unemployment to Poverty in Indonesia (2013-2017)

Abstract

Poverty is a problem of development that must be reduced because it can cause several social problems. Islam considers that poverty can endanger the soul and faith, so that it is considered close to kufr. Based on the existing theories and some researches that have been done, the poverty problem is generally related to some factors such as quality of human resources, unemployment, and economic growth.

This study aims to determine the influence of human development index (HDI), unemployment rate, and economic growth directly to the rate of poverty. In addition, it aims to know the indirect effects of HDI and economic growth through unemployment in influencing the rate of poverty. This study belongs to quantitative research, with a sample of 33 provinces in Indonesia. The data used in this study are secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS). The panel data are time series data from 2013-2017 and cross section data from 33 provinces in Indonesia. The analysis method used is path analysis with WarpPLS 5.0 software for its data processing.

The results of this study indicate that the HDI affect directly and negatively to the rate of poverty with path coefficient of the -0.71. Economic growth has no significant effect on poverty reduction with probability 0.23. Then, it shows that unemployment has positive effect on poverty rate with path coefficient of 0.14 and have significant influence with probability 0.0035. This study also shows that unemployment can mediate HDI and poverty. In addition, unemployment can also mediate economic growth and poverty.

Keywords: HDI, economic growth, unemployment, poverty

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang teramat besar ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sebuah anugerah yang tiada dapat terbilang, terutama kesehatan, ilmu, iman, dan Islam yang hanya dengannya kita dapat menjadi manusia yang paripurna, mampu menempuh jalan yang sebaik-baiknya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Solawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw., para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman.

Karya tulis yang berjudul, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia (2013-2017)” ini merupakan tugas akhir penulis sebagai mahasiswa pascasarja di UIN Walisongo Semarang. Penyelesaian penulisan karya ini tidak lepas dari ide-ide, saran, dan kritik yang amat konstruktif dari pihak-pihak yang telah menjalin komunikasi akademis dengan penulis. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.Ag, Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang
3. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam
4. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag. Ketua Prodi S2 Ekonomi Syariah.
5. Dr. Ali Murtadho, M.Ag. Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan ide-ide yang sangat berharga sehingga penulis banyak menemukan pengetahuan baru dan kemudahan dalam

menyelesaikan tugas akhir.

6. Dr. Ari Kristin P, S.E. M.Si. Dosen Pembimbing Tugas akhir sekaligus Wakil Ketua Prodi S2 Ekonomi Syariah, terimakasih atas waktu, masukan, motivasi, dan ide-ide yang konstruktif sehingga penuli bersungguh-sungguh menyelesaikan penulisan karya ini secara optimal.
7. Para dosen Penguji dalam sidang komprehensif dan proposal tesis yang juga memberikan ide-idenya yang sangat konstruktif.
8. Para dosen Mata kuliah yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan motivasi selama perkuliahan.
9. Para staf dan pegawai Program Studi S2 Ekonomi Syariah yang sangat membantu memudahkan penulis secara administratif.
10. Rekan-rekan sekelas dan semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis sangat menyadari bahwa karya kecil ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, koreksi dan masukan yang bersifat membangun sangat berharga untuk perbaikan karya ini guna kebaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap karya ini dapat menambah wawasan bagi pencinta ilmu ekonomi syariah dan bermanfaat baik bagi kalangan akademis maupun para masyarakat secara umum.

Semarang, 10 Juli 2018

Penulis,

U. Sulia Sukmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PENGESAHAN	v
NOTA DINAS	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Deskripsi Teori.....	13
1. Tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang memengaruhi	13
2. Pengangguran dan korelasinya dengan kemiskinan	28
3. Pertumbuhan Ekonomi dan korelasinya dengan kemiskinan.....	37
4. Indeks Pemabangunan Manusia dan keterkaitan dengan kemiskinan.....	50
B. Kajian Pustaka.....	59
C. Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Berpikir.....	66
BAB III METODE PENELITIAN.....	77
A. Pendekatan Penelitian	77
B. Tempat dan Waktu Penelitian	78
C. Populasi dan Sampel Penelitian	78
D. Variabel penelitian	79
1. Variabel Dependen	80

2. Variabel Independen	81
3. Variabel Intervening	84
E. Teknik Pengumpulan Data.....	84
F. Teknik Analisis Data	86
1. Evaluasi <i>Outer Model</i>	87
2. Evaluasi <i>Inner Model</i>	87
G. Uji Hipotesis	88
1. <i>Direct Effect</i>	90
2. <i>Indirect Effect</i>	90
3. <i>Total Effect</i>	91
BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	93
A. Gambaran Umum Variabel Penelitian	93
1. Kemiskinan.....	93
2. Indeks Pembangunan Manusia.....	99
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	108
4. Pengangguran.....	113
B. Analisis Data dan Pembuktian Hipotesis	117
1. Evaluasi <i>Outer Model</i>	118
2. Evaluasi <i>Outer Model</i>	118
3. Uji Hipotesis	120
4. Interpretasi Model.....	121
C. Keterbatasan Penelitian	133
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Datar Garis Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia Periode 2013-2017	I
Lampiran 2. Data IPM, TPT, PE, pengangguran, dan Kemiskinan periode 2013-2017 di 33 provinsi di Indonesia	IV
Lampiran 3. Model fit	XIII
Lampiran 4. Path coeficint dan P value	XIV
Lampiran 5.R squared	XV
Lampiran 6. Indirect and total effect	XVI
Lampiran 7. Biodata Penulis	XVII

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anggaran kemiskinan dan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2013-2017	3
Tabel 2. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Indonesia periode 2010-2017	8
Tabel 3. Garis kemiskinan di Indonesia periode 2013-2017	21
Tabel 4. Nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator.....	57
Tabel 5. Jenis dan sumber data	85
Tabel 6. Tingkat kemiskinan 33 provinsi di Indonesia periode 2013-2017	93
Tabel 7. Kategori tingkat kemiskinan di atas dan di bawah rata-rata nasional periode 2013-2017.....	95
Tabel 8. IPM 33 provinsi di Indonesia periode 2013-2017	100
Tabel 9. Kategori IPM tiap provinsi di Indonesia periode 2013-2017	102
Tabel 10. Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan 2010 tiap provinsi di Indonesia periode 2013-2017 (satuan %)	109
Tabel 11. Kategori pertumbuhan ekonomi di atas dan di bawah rata-rata nasional periode 2013-2017	111
Tabel 12. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di 33 provinsi di Indonesia periode 2013-2017 (satuan %)	114
Tabel 13. Hasil <i>output general result</i>	119
Tabel 14. <i>Path coefficients and p values</i> pada <i>direct effect</i>	120
Tabel 15. <i>Indirect effect</i> dengan variabel PGRN (tingkat pengangguran terbuka) sebagai variabel intervening.....	121
Tabel 16. <i>Total effect</i>	121
Tabel 17. Gini rasio di Indonesia periode 2013-2017.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lingkaran kemiskinan.....	25
Gambar 2. Korelasi tingkat kemiskinan, IPM, pertumbuhan ekonomi, dan lingkaran kemiskinan	28
Gambar 3. Arus Lingkaran Perekonomian	49
Gambar 4. Pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan	69
Gambar 5. Segitiga pertumbuhan, ketimpangan, dan kemiskinan	70
Gambar 6. <i>Path analysis</i>	76
Gambar 7. Dimensi pembentuk IPM	82
Gambar 8. Konseptualisasi model	86
Gambar 9. Tingkat kemiskinan di Indonesia 2013-2107.....	98
Gambar 10. IPM di Indonesia 2013-2017	105
Gambar 11. Angka harapan hidup di Indonesia 2013-2017.....	106
Gambar 12. Harapan lama sekolah di Indonesia 2013-2017	107
Gambar 13. Pengeluaran perkapita per tahun di Indonesia 2013-2017.....	108
Gambar 14. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia 2013-2017.....	116
Gambar 15. Output model struktural pengolahan data dengan WarpPLs	118
Gambar 16. Hubungan kausalitas 3 dimensi IPM	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang dapat terjadi di mana saja, baik di negara maju maupun berkembang. Sebagai negara berkembang, kemiskinan merupakan salah satu isu besar di dalam perekonomian Indonesia, seolah-olah menjadi “pekerjaan rumah” yang belum dapat terselesaikan. Isu kemiskinan sebagai masalah yang kronis melanda bangsa Indonesia sangat berpotensi menghambat pembangunan ekonomi sebagai proses natural untuk mewujudkan cita-cita negara yaitu masyarakat makmur sejahtera, adil, dan merata¹ sehingga bermuara pada timbulnya berbagai dampak sosial dan keresahan dalam tubuh masyarakat.

Usaha pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan sebenarnya sudah ditempuh dengan berbagai cara, mulai dari program bantuan modal atau uang tunai kepada rakyat miskin sampai program transmigrasi.² Namun, semua program tersebut belum menampakkan hasil yang signifikan dalam penuntasan

¹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 1-2.

² Salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Lihat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Program Keluarga Harapan (PKH)”, diakses 11 April 2018, <http://www.tnp2k.go.id>.

kemiskinan.³ Dengan sekedar memberikan bantuan langsung, tidaklah cukup menjadikan masalah ini selesai karena bantuan tersebut umumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek yang sifatnya sesaat. Usaha-usaha yang berorientasi untuk jangka panjang justru harus lebih diprioritaskan terutama pada sumber daya alam dan pembinaan sumber daya manusia agar masyarakat miskin terdorong untuk mengubah nasibnya melalui berbagai upaya dengan memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang tersedia sebagai karunia Allah SWT yang amat bernilai.

Anggaran negara untuk mengentaskan kemiskinan setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Tetapi, penurunan tingkat kemiskinan tidak menunjukkan angka yang signifikan. Pada tahun 2011, anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBN sekitar Rp74.3 triliun. Kemudian, pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp93.5 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2012, anggaran kemiskinan bertambah menjadi Rp109.2 triliun. Sampai tahun 2017, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp228.2 triliun⁴. Namun, rata-rata angka kemiskinan selama 6 tahun tersebut hanya mampu turun kurang dari 1%, bahkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan.

³ Amalia, *Keadilan Distributif dalam*, 2.

⁴ Kemenkeu “Anggaran Kemiskinan 2011-2017,” diakses 11 April 2018, <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id>.

Tabel 1. Anggaran kemiskinan dan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2011-2017

Tahun	Anggaran Kemiskinan (Triliun Rupiah)	Penurunan Tingkat Kemiskinan (%)
2011	74.3	0.84
2012	93.5	0.83
2013	119.0	0.19
2014	131,2	0.51
2015	172.4	-0.17
2016	214.4	0.57
2017	228.2	-0.4

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 1990, laporan Bank Dunia, *World Development Report on Poverty* mendeklarasikan hal yang harus diperangi dalam mengatasi kemiskinan yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting dalam kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi pembangunan ekonomi. Semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, perekonomian wilayah tersebut akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.⁵ Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, akan menyebabkan terjadinya *trickle-down effect*.⁶ Beik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi

⁵ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar, edisi ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 9.

⁶ *Trickle-down effect* ini menyatakan bahwa dengan kemajuan perekonomian suatu negara, dengan sendirinya akan menetas ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan akan menumbuhkan berbagai kondisi ekonomi.

haruslah terdistribusi dengan normal (merata) agar warga negara dapat hidup dengan standar dalam memenuhi kebutuhan secara layak.

Lain halnya dengan Jumika (2012), ternyata teori tersebut tidak sesuai dengan realita yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan.⁷ Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Soleh (2011) bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, sebagaimana yang terjadi di Provinsi Papua Barat yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional (11,27% per tahun), namun persentase penduduk miskin di provinsi tersebut menduduki posisi nomor dua (35,77%) setelah Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tidak berpihak kepada penduduk miskin.⁸

Selain pertumbuhan ekonomi, keberhasilan perekonomian menurut konsep pembangunan ekonomi Islam ialah bergantung pada keberhasilan pembangunan manusia. Manusia adalah makhluk pembangunan yang kualitasnya ditentukan oleh hasil

⁷ Jumika, “Analisis Pengaruh PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (Analisis Data Panel terhadap 35 Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009)”, “ (Tesis, Program Pascasarjana Megister Ekonomi dan Studi Pembangunan Surakarta, 2012), 77.

⁸ Ahmad Soleh, “Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2.2 (2014): 207, diakses 12 Mei 2018, <http://jurnal.unived.ac.id>

pembangunannya.⁹ Hal ini selaras dengan ajaran Islam yakni manusia merupakan makhluk utama pembangunan yang harus memakmurkan Bumi dengan baik.¹⁰ Manusia harus dibekali kemampuan baik ilmu maupun kesehatan agar dapat melaksanakan program pembangunan dengan sebaik-baiknya. Walaupun memiliki sumber daya alam yang terbatas, jika sumber daya manusianya berkualitas maka akan teratasi dalam pengelolaannya.

Pembangunan manusia merupakan ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan manusia ini juga merupakan proses pembangunan dalam memperluas pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Gabungan dari ketiga komponen tersebut dinamakan dengan indeks pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang paling komprehensif karena selain memperhitungkan aspek materi, juga memperhitungkan aspek nonmateri. IPM yang rendah mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja penduduk. Selanjutnya, produktivitas yang rendah akan mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin, begitu juga sebaliknya.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa IPM memengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Hal ini misalnya sebagaimana penelitian yang dilakukan Jumika (2012) bahwa IPM sangat

⁹ Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina, 2001.

¹⁰ Q.S. Hūd: 61.

memengaruhi penurunan jumlah kemiskinan di Jawa Tengah.¹¹ Akan tetapi berbeda dengan penelitian Dwi Susilowati (2015) yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan kausalitas antara IPM dan kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 1990-2013.¹² Kontradiksi ini mengindikasikan bahwa pentingnya riset serupa dalam rangka mengetahui hubungan IPM dan kemiskinan dalam cakupan wilayah tertentu baik lingkup kecil maupun lingkup yang lebih luas seperti Indonesia sebagai arahan bagi pengambilan kebijakan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan yang hubungannya bersifat dinamis dari waktu-waktu.

Faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang dapat mengurangi tingkat kemakmuran karena pendapatan akan mencapai maksimum dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*). Semakin rendah tingkat kemakmuran, semakin besar peluang timbulnya kemiskinan. Selain itu, pengangguran yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif yang lain seperti kekacauan sosial.

Ada atau tidaknya pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan diperkuat oleh penelitian Siti Walida (2015) di Provinsi

¹¹ Jumika, “*Analisis Pengaruh PDRB,*” 78.

¹² Dwi Susilowati & Muhammad Sri Wahyudi, “Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri, dan Kemiskinan (Kajian Teoritis di Indonesia),” *Ekonomika-Bisnis*, 6.1, (2015): 100. Diakses 25 April 2018. DOI: <http://doi.org/10.22219/JIBE.vol6.No1.89-106>.

Sulawesi Selatan yakni setiap kenaikan pengangguran diikuti peningkatan kemiskinan.¹³ Berbeda dengan Ni ketut (2016), bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, yang disebabkan oleh banyaknya penduduk Bali yang bekerja tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang tersedia sehingga mereka menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik¹⁴.

Gambaran tentang kemiskinan tentu saja sangat merisaukan karena terjadi di Indonesia yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Letak geografisnya juga sangat strategis karena merupakan pusat lalu lintas maritim antarbenua, yang luas wilayahnya sekitar 1.913.578,68 km²¹⁵ dengan segala flora, fauna, dan potensi hidrografisnya. Dengan kekayaan tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk mampu mengatasi kemiskinan. Tetapi, pada tahun 2013-2017, Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang fluktuatif dengan

¹³ Siti Walida Mustamin, dkk, “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”, *Jurnal Analisis, Desember, Issn 2303-100x* 4. 2 (2015) : 169, diakses 12 April 2018, pasca.unhas.ac.id.

¹⁴ Ni Ketut Eni Endrayani dan Made Heny Urmila Dewi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”, *ISSN : 2337-3067, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.1 (2016) : 84, diakses 12 April 2018, <https://ojs.unud.ac.id>.

¹⁵ Tjahjo Kumolo, “Buku Induk Ko de Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Seluruh Indonesia”, 214. (2014) Diakses 12 April 2018, [Http://Www.Kemendagri.Go.Id](http://Www.Kemendagri.Go.Id)

pengangguran yang tergolong tinggi (lebih dari 4%). Hal inilah yang membuat perlunya analisis terhadap indikator-indikator yang diduga kuat dalam memengaruhi tingkat kemiskinan, diantaranya pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pengangguran.

Tabel 2. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Indonesia periode 2010-2017

Tahun	Tingkat kemiskinan (%)	TPT (%)
2010	13.33	7.14
2011	12.49	7.48
2012	11.66	6.13
2013	11.47	6.17
2014	10.96	5.94
2015	11.13	6.18
2016	10.7	5.61
2017	10.12	5.61

Sumber: Badan Pusat Statistik

Di dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang membahayakan jiwa dan iman seseorang karena sangat dekat dengan kekufuran. Dengan hidup miskin, seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama secara maksimal, tidak dapat mengecap pendidikan yang baik, dan akses kehidupan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik secara agama, ilmu, maupun ekonomi (kesejahteraan), sebagaimana Allah berfirman:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar”(Q.S. An-Nisa⁷: 9).

Menurut Ibnu Katsir, keturunan yang lemah identik dengan kondisi kekurangan harta ya itu diperkuat dengan penjelasannya mengenai pesan Rasulullah kepada Sa’ad Abī Waqāsh untuk meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan berkecukupan.¹⁶ Jika ditelaah lebih jauh, ayat ini memiliki pesan filosofis yang sangat penting bahwa kemiskinan menjadi isu yang tidak dapat diabaikan begitu saja sehingga dalam konteks kekinian, analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan menjadi hal yang wajib dilakukan secara kontinyu sebagai wujud kepedulian terhadap problematika sosial di Indonesia. Selain itu, hal ini juga sebagai upaya melaksanakan ajaran Islam yang mendorong manusia melepaskan diri dari bahaya kemiskinan.

Di dalam teologi pembangunan Islam dan konsep pembangunan ekonomi Islam, terdapat salah satu prinsip bahwa

¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-qur’ān al-‘Adzhīm*, Juz 2, 222, *Maktabah Syāmilah*.

manusia merupakan faktor penting di dalam pembangunan.¹⁷ Faktor kualitas manusia ini pengertiannya lebih dekat dengan problem yang selalu menjadi perhatian banyak kalangan yang sifatnya melekat pada diri manusia yaitu kualitas IPM dan pengangguran. Selain itu, teologi pembangunan Islam juga menyatakan bahwa pembangunan merupakan sebuah keniscayaan.¹⁸ Pembangunan yang dilakukan secara holistik dan integralistik ini tentu akan berdampak pada peningkatan berbagai kualitas dari berbagai objek pembangunan yang ditandai dengan kemajuan pembangunan itu sendiri, termasuk pertumbuhan ekonomi. IPM, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi inilah yang akan dikaji hubungannya dengan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia dengan melihat sigifikansinya melalui perspektif ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan?

¹⁷ Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan*, 66.

¹⁸ Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan*, 66.

4. Bagaimana pengaruh IPM terhadap kemiskinan melalui pengangguran?
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan melalui pengangguran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel yang digunakan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan.
4. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan melalui pengangguran.
5. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan melalui pengangguran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dalam menyusun strategi dan perumusan kebijakan untuk pembangunan wilayah/dacrah agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

2. Sebagai pembuktian bahwa variabel tingkat IPM, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran secara langsung dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. Sekaligus agar dapat menunjukkan suatu bukti empiris bahwa variabel pengangguran dapat digunakan sebagai variabel intervening dalam memengaruhi tingkat kemiskinan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang memengaruhinya

Di dalam bahasa Arab, kata miskin terambil dari kata *sakana* (سكن) yang berarti diam atau tenang, sedangkan kata *masākīn* (مساكين) ialah bentuk jama' dari *miskīn* (مسكين).¹ Huruf *sin*, *kaf* dan *nun* menunjukkan makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergejolak. Sehingga dapat diartikan orang miskin yaitu orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya. Keadaan ini dikarenakan kondisi dan situasi yang membuat orang tersebut sedikit untuk bergerak dalam memenuhi kebutuhannya.²

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Dalam arti luas, kemiskinan bukan saja berkaitan dengan ketidakpunyaan harta, tetapi berhubungan pula dengan miskin pengetahuan, miskin kekuasaan, dan miskin kasih sayang. Belum adanya kesepakatan definisi kemiskinan dalam satu

¹ Sidi Gazalba, *Ilmu Islam: Asas Agama Islam*, cetakan ke- 2, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985), 134.

² Bayu Tri Cahya, "Kemiskinan Ditinjau dari Perpekstif Al-Quran dan Hadis", *Jurnal Penelitian*, 9 (2015): 46. Diakses 12 April 2018. [Http://journal.stainkudus.ac.id](http://journal.stainkudus.ac.id).

definisi yang baku menyebabkan munculnya perspektif yang beragam mulai dari perspektif ekonomi hingga moralitas. Kemiskinan, baik dipandang dari perspektif ekonomi maupun moral dapat menimbulkan bahaya yang menakutkan di antaranya dapat membahayakan akidah, membahayakan moral, mengancam kestabilan pemikiran, membahayakan keluarga, dan mengancam stabilitas masyarakat.³

Pengertian kemiskinan memang selalu berkaitan dengan kondisi kekurangan harta,⁴ karena harta dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia diantaranya sandang, pangan, dan papan⁵. Menurut As-Shiddiqie, miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan.⁶ Menurut Muhammad Syauqi al-Fanjiri, orang-orang miskin merupakan orang-orang yang hidup di dalam standar tertentu yang jauh dari standar hidup pada umumnya di dalam masyarakat di suatu wilayah atau di seluruh dunia. Dengan pengertian lain, orang-orang miskin yaitu orang-orang yang tidak memiliki keberlebihan standar hidup yang layak di dalam kehidupannya berdasarkan waktu dan tempat. Dengan

³ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam dalam Mengentasi Kemiskinan*, terj. Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 22-29.

⁴ Wildana Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 50.

⁵ Ahmad Sodeq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Equbilirium*, 3.2 (2015): 389, diakses 12 April 2018, <http://journal.stainkudus.ac.id>

⁶ Teungku Hasby Ash-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 20 06), 166.

istilah pemikiran ekonomi Islam, orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki keberlembihan batas ketercukupan (*haddul kifāyah*) atau batas kelimpahan (*haddul ghinā*). Jelas bahwa batas ketercukupan adalah batas minimal di dalam penghidupan dari sesuatu yang dimakan, yang dipakai, maupun tempat tinggal yang apabila tanpanya seseorang tidak dapat hidup atau melakukan tindakan produktif sehingga ia termasuk orang yang tidak mampu (kekurangan). Tidak diperselisihkan pengertian miskin ini kecuali perselisihan dalam hal kemampuan pembelian di dalam setiap waktu dan tempat.⁷

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama di antaranya Abu Hanifah mengatakan bahwa orang miskin lebih buruk daripada orang fakir. Sedangkan Ibnu Jarir berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang butuh, tapi tidak meminta-minta. Sedangkan orang miskin adalah orang yang butuh tapi dia meminta-minta di kalangan orang ramai. Qatadah berkata bahwa orang fakir adalah orang yang butuh dan mempunyai penyakit menahun, sedangkan miskin orang yang butuh tapi badannya sehat.⁸

⁷ Muhammad Syauqiy Al-Fanjirī, *Al-Islām Wa ‘Adālah At-tauzī’ Au Hifdzut Tawāzun Al-Iqtishādiy Baina Afrādil Mujtama’ Wa Duwalul ‘Ālam*, Cet.ke-1, (Riyadh: Dār Tsaqīf, 1984), 20-21.

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Alquran al-Adzhim*, juz 4, (*Maktabah Syāmilah*, 1999),165-166

Jumhur ulama memandang bahwa keadaan orang-orang fakir lebih buruk daripada orang miskin. Menurut Yusuf Qardhawi, perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang-orang fakir tidak memiliki apa-apa, atau orang-orang yang hanya dapat memenuhi kurang dari separo kebutuhan hidupnya atau tidak sampai separo dari batas kecukupan. Sedangkan orang-orang miskin adalah orang-orang yang mampu memenuhi separoh dari kebutuhan hidupnya atau sebagian besar dari kebutuhannya, namun tidak sempurna mencukupi seluruhnya dari batas kecukupan.⁹ Di dalam al-Quran dinyatakan hal tersebut seperti yang terdapat di dalam surat al-Kahfi ayat 79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا
وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera”.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang miskin masih memiliki sesuatu yang digunakan untuk mencari nafkah yang dicontohkan dengan bahtera yang mereka gunakan. Hal ini menggambarkan

keadaan orang miskin melebihi orang fakir.¹⁰ Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) fakir yaitu orang yang sangat berkekurangan orang yang terlalu miskin,¹¹ sehingga jika dilihat dari pengertian tersebut, fakir di Indonesia yang melakukan pengeluaran per kapitanya kurang dari 0,8 garis kemiskinan dalam sebulan¹².

Fakir dan miskin merupakan golongan yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika miskin disebutkan secara sendiri maka mencakup juga kata fakir, begitu juga sebaliknya. Tetapi, jika keduanya disebutkan secara bersama-sama maka para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang di antara mereka yang paling memerlukan bantuan. Walaupun terdapat perbedaan pengertian antara fakir dan miskin, kedua golongan tersebut sama-sama berada di bawah garis kemiskinan sehingga perlu mendapat perhatian dari pihak pemerintah maupun masyarakat agar kedua golongan tersebut dapat keluar dari garis kemiskinan.

Pengertian yang dijelaskan oleh sebagian besar ulama seperti yang disebutkan di atas sebenarnya senada dengan

¹⁰Bayu Tri Cahya, “Kemiskinan Ditinjau dari Perpekstif Al-Quran dan Hadis”, *Jurnal Penelitian*, 9 (2015), 50, diakses 12 April 2018, <http://journal.stainkudus.ac.id>.

¹¹ KBBI

¹² Badan Pusat Statistik, *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016* (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2016), 41, diakses 19 Maret 2018, <https://www.bps.go.id>.

pengertian yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun nonmakanan¹³. Pengertian dari BPS ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk dan rumah tangga miskin yang biasanya digunakan untuk perencanaan yang lebih makro, termasuk penghitungan dana perimbangan pusat-daerah.¹⁴

Memahami kemiskinan membutuhkan adanya tolok ukur kebutuhan dasar minimum. Dengan adanya tolok ukur tingkat kemiskinan, akan menjadi mudah diketahui golongan-golongan miskin yang selanjutnya memudahkan penanggulangan atau perumusan kebijakan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, agar dapat menentukan standar kemiskinan digunakanlah peran adat dan tradisi (*'adah* dan *'urf*). Aturan inilah yang membolehkan pemerintah untuk mempertimbangkan standar kontemporer dalam menentukan biaya hidup. Berkaitan dengan kondisi tersebut, aturan utama bahwa “*adat adalah sumber keputusan hukum*” dapat diterapkan. Dalam hal ini dibolehkannya pemerintah mempertimbangkan standar kontemporer dalam

¹³Badan Pusata Statistik, “kemiskinan-dan-ketimpangan”, diakses 10 April 2018, <https://www.bps.go.id>

¹⁴ Ade Cahyat, “Governance Brief Bagaimana Kemiskinan di Ukur? Beberapa Penghitungan Kemiskinan di Indonesia”, di akses 10 Juli, <http://www.cifor.org>.

menentukan biaya hidup.¹⁵ Bahkan menjadi kewajiban bagi negara untuk membangun indikator yang menjadi parameter terpenuhi tidaknya kebutuhan dasar yang menjadi standar rata-rata kebutuhan minimal yang berlaku di suatu negara dan dapat berubah setiap waktu sehingga pemerintah harus melakukan supervisi secara berkala.¹⁶

Kebutuhan dasar (*basic need*) yang dirumuskan menurut BPS tentu sesuai dengan tujuan syari'at yang menjunjung tinggi kebutuhan dasar bagi manusia. Kriteria golongan miskin yang menjadi syarat utama mendapatkan bantuan (zakat) di dalam al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan secara jelas situasi kesulitannya yaitu situasi di mana seseorang memerlukan bantuan. Hal inilah yang menyebabkan para ahli boleh menentukan kriteria yang bisa menjadi patokan, apakah orang tersebut pantas menerima bantuan atau tidak.¹⁷

Di Indonesia pengukuran kemiskinan menggunakan kriteria dari BPS. Pengukuran yang dilakukan oleh BPS ini lebih akurat, fleksibel, dan memiliki kaidah-kaidah statistik yang dijalankan dalam survei dan pengolahan data. BPS menentukan

¹⁵ Ningrum, "Analisa Metode Penetapan," 100

¹⁶ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 40.

¹⁷ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, ISSN : 2579-8391, 1, (2017), 99, diakses 16 Mei 2018, <https://scholar.google.co.id>

kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan tersebut mengikuti konsep kemiskinan absolut yang didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai “*inability of the individual to meet basic needs*”¹⁸. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.¹⁹

Garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan maupun nonmakanan, yang juga akan mengalami perubahan setiap waktu. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket

¹⁸ Ririn Tri Puspita Ningrum, “Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia”. *ENGAGEMENT Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA ISSN : 2579-8375, 1, (2017), 88, diakses 12 April 2018, <https://scholar.google.co.id>.

¹⁹ Badan Pusat Statistik, “Kemiskinan dan Ketimpangan”, diakses 12 April 2018, <https://www.bps.go.id>.

komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh jenis komoditi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. Sedangkan garis kemiskinan nonmakanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, listrik, angkutan, dan kesehatan.²⁰ Adapun hubungan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Tabel 3. Garis Kemiskinan di Indonesia Periode 2013-2017

Tahun	Perkotaan	Pedesaan
2013	275779	27579
2014	326853	29661
2015	356378	33304
2016	372114	35040
2017	400995	37091

Sumber: BPS

Kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut (*absolute poverty*) dan kemiskinan relatif (*relative poverty*). Kedua kemiskinan tersebut memiliki perbedaan pada standar penilaiannya. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan dalam penilaian objektif. Dikatakan kemiskinan absolut apabila tingkat

²⁰ Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan dan Ketimpangan", diakses 12 April 2018, <https://www.bps.go.id>

pendapatan berada di bawah garis kemiskinan, atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.²¹ Kebutuhan hidup minimum tersebut dapat diukur dengan kurang pangan, kurang sandang, kurang perumahan, dan kurang kebutuhan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan ini disebabkan oleh kemiskinan natural, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural.

Sedangkan pengertian dari kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah di atas garis kemiskinan sehingga sebenarnya sudah tidak termasuk miskin, tetapi masih lebih miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan dalam perspektif subjektif. Dengan ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antargolongan penduduk, antarsektor kegiatan ekonomi maupun ketimpangan antardaerah, dan bahkan antarnegara di dunia.²² Kemiskinan relatif pasti terjadi karena Allah sudah membagi rezeki yang berbeda-beda baik antarindividu maupun wilayah. Keadaan ini

²¹ Badan Pusat Statistik, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2016*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), 5

²² Muhdar HM, “Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi”, *Jurnal Al-Buhuts*, ISSN 1907-0977 E ISSN 2442-823X, 11 (2015) : 48, diakses 22 Juni 2017, <https://scholar.google.com>.

sudah menjadi sunnatullah kehidupan yang sudah digariskan oleh Allah.

Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, seperti sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya sehingga mereka tidak dapat ikut serta dalam pembangunan, melainkan hanya mendapatkan imbalan pendapatan yang rendah. Bisa saja kemiskinan natural ini dikarenakan miskin ilmu sehingga memiliki produktivitas yang rendah dan dapat menyebabkan kemiskinan absolut. Dalam mengatasinya, manusia dituntut agar dapat mengoptimalkan kemampuannya walau dalam kondisi lemah sekalipun. Selain itu, kemiskinan ini dapat juga disebabkan oleh kondisi alamnya yang kurang kondusif dalam menyejahterakan manusia. Dalam hal ini, Islam mengajarkan sikap optimis dalam menghadapi kondisi tersebut yang semua itu bergantung pada mental manusia itu sendiri. Selain itu, kurangnya sumber daya termasuk peralatan produksi dapat juga disebabkan kelalaian pemerintah.²³ Dengan demikian, pemerintah juga harus berupaya menumbuhkan dan

²³ ‘Abdul Hādi al-Fadhālī, *Musykilatul Faqr*, cetakan ke-4, (Beirut: Dār az-Zahrah, 1977), 27.

mengembangkan segala sumber daya agar terjadi kegiatan ekonomi yang memadai.

Selanjutnya, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh hasil pembangunan yang belum seimbang sehingga tidak dapat dirasakan oleh khalayak umum, dimana modal hanya terkonsentrasi di tangan orang-orang kaya saja. Kemiskinan ini akan mengakibatkan terjadinya kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Selain diperlukannya kebijakan pemerintah dan peran distribusi hasil pembangunan yang merata oleh berbagai pihak, kemiskinan ini dapat diatasi dengan pembekalan ilmu dan keterampilan untuk memicu produktifitas seseorang. Dengan ilmu dan keterampilan, manusia menjadi lebih produktif sehingga mampu memicu pemerataan ekonomi.

Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya, yang mana mereka sudah merasa berkecukupan dan tidak merasa kekurangan.²⁴ Kemiskinan ini juga disebabkan oleh budaya malas, tidak mau kerja keras, dan tidak disiplin sehingga menghasilkan etos kerja yang sangat rendah.²⁵ Kemiskinan seperti ini sulit dihilangkan kecuali dengan mengubah paradigma mereka bahwa dalam menjalankan kehidupan di Bumi, mereka harus berpikir maju dari segi apa pun dan termotivasi untuk

²⁴ HM, "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran," 49.

²⁵ Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014), 29.

mendapatkan materi yang lebih untuk keperluan dunia dan akhirat yang hanya dapat diraih dengan bekerja.

Kemiskinan jika tidak diatasi maka akan terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Menurut Ragnar Nurske, lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*) menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan dikarenakan tabungan rendah, investasi rendah, kekurangan modal, rendahnya produktifitas, pendapatan rendah yang kembali menyebabkan tabungan rendah dan seterusnya.²⁶ Menurut Nurske, ada dua jenis lingkaran kemiskinan yang menghalangi negara-negara berkembang untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat, yaitu dari sisi penawaran modal dan permintaan modal, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Lingkar kemiskinan²⁷

²⁶ Nano Prawoto. “Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9.1, (2009): 59, diakses 12 April 2018, <https://scholar.google.co.id>.

²⁷ M.L Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta: Rajawali, 2016), 34.

Dari segi permintaan (gambar a), jika jumlah orang miskin bertambah maka pendapatan menjadi rendah yang menyebabkan permintaan rendah sehingga mengakibatkan investasi menjadi rendah. Jika investasi rendah maka akan menyebabkan modal dan produktivitas rendah sehingga mengakibatkan luas pasar untuk jenis barang menjadi terbatas. Dari segi penawaran (gambar b), produktivitas rendah akan mengakibatkan tingkat pendapatan rendah sehingga rendahnya kemampuan masyarakat untuk menabung. Hal ini akan menyebabkan peluang investasi dan pembentukan modal juga rendah. Negara akhirnya akan mengalami kekurangan modal yang pada gilirannya akan menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas.²⁸

Adapun terjadinya kemiskinan di antaranya disebabkan oleh keterbelakangan manusia²⁹ dan sumber daya alam³⁰. Pengelolaan sumber daya alam sangat tergantung kemampuan produktif manusia. Jika penduduknya banyak yang miskin dan berpendidikan rendah maka akan mengakibatkan langkanya keterampilan teknik, pengetahuan, dan aktivitas kewiraswataan yang secara otomatis akan menyebabkan sumber daya alam yang tersedia justru terbengkalai, tidak berkembang, atau bahkan salah guna. Sumber daya alam ini akan memengaruhi tingkat

²⁸ Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, 34.

²⁹ Secara kuantitatif dapat dinyatakan dalam IPM

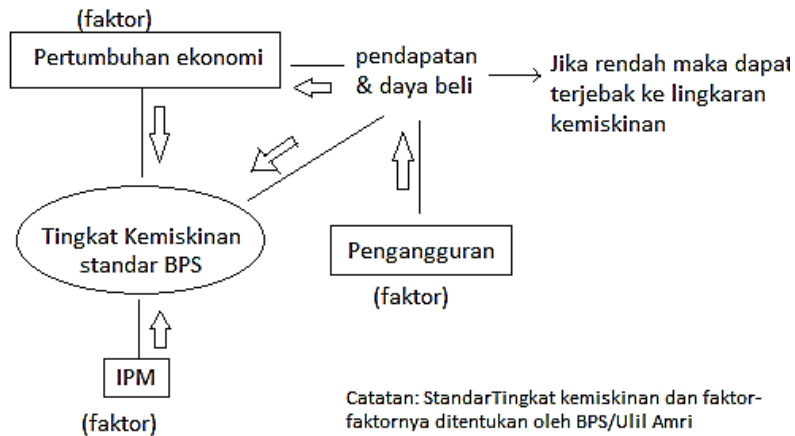
³⁰ Sumber daya alam juga sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi (PDRB).

pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kurangnya sumber daya alam akan menyebabkan kemiskinan karena sumber daya alam adalah sumber utama kebutuhan hidup manusia. Kemiskinan sumber daya alam merupakan sebab dan sekaligus akibat kemiskinan manusia.³¹

Selanjutnya, penyebab lain dari kemiskinan adalah kurangnya sumber daya manusia. Jika manusia tidak memiliki keterampilan maka ia tidak akan memiliki pendapatan yang menyebabkan daya belinya berkurang sehingga masuk ke dalam lingkaran kemiskinan. Ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah bahkan negara. Sumber daya manusia akan memengaruhi IPM dan dapat memengaruhi tingkat pengangguran.

Dari paparan di atas, tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang memengaruhinya serta korelasinya dengan lingkaran kemiskinan dapat dideskripsikan sebagai berikut.

³¹ Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, 34.



Gambar 2. Korelasi tingkat kemiskinan, IPM, pertumbuhan ekonomi dan lingkaran kemiskinan

2. Pengangguran dan korelasinya dengan kemiskinan

Dalam memenuhi kebutuhan manusia, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat at-Taubah ayat 105 sebagai berikut:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Selain itu, bekerja merupakan kewajiban agama yang harus dilakukan oleh manusia sesuai potensi dan kapasitas yang dimilikinya sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yaitu:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

“Sesungguhnya Allah mencintai jika seorang melakukan pekerjaan yang dilakukan secara itqan (profesional)” (HR. Baihaqi)³² (4929).

Dalam mencapai kesempurnaan ikhtiar, manusia tidak boleh berputus asa untuk mencapai tujuannya sehingga mendapatkan apa yang diinginkannya.³³ Hal tersebut mencerminkan betapa manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan pekerjaan yang halal dan baik. Bermalas-malasan atau menganggur akan mendatangkan dampak negatif bagi pelaku dan juga terhadap perekonomian karena pengangguran dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam memanfaatkan potensi yang merupakan faktor produksi. Dalam hal ini, menganggur akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menggantungkan hidupnya pada orang-orang yang produktif sehingga menjadikan angka ketergantungan meningkat dan merosotnya pendapatan per kapita.

³² Al-Baihaqi, *Sya'bul Imān*, Juz 7, *Maktabah Syāmilah*, 232

³³ ‘Ali ibn Nayf Asy-Syuhūd, *Al-Mufashshil Fī Syarhi Ayāh Lā Ikrāhafiddīn*, Juz 2, *Maktabah Syāmilah*, 229.

Pengangguran menurut ekonomi konvensional dibatasi hanya pada pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Berbeda menurut Islam, istilah kerja menyangkut berbagai aktifitas kegiatan manusia baik yang bersifat badaniah maupun rohaniyah untuk mewujudkan atau menambah suatu manfaat yang dibolehkan secara syar'i. Ketika seseorang tidak mau mempergunakan potensinya, itulah pengangguran yang sangat berbahaya baik bagi dirinya maupun masyarakat karena orang yang demikian merupakan penganggur yang memikul dosa. Akan tetapi, jika seseorang yang terus memfungsikan potensinya baik modal, tenaga maupun pikirannya maka orang tersebut tidak termasuk kategori menganggur walaupun dirinya belum bekerja yang menghasilkan upah.³⁴

Umumnya pengangguran terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak mampu menyerap pencari kerja yang selalu bertambah. Selain itu, pengangguran juga menjadi tolok ukur baik buruknya perekonomian suatu negara. Menurut Mankiw, pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.³⁵ Menurut BPS,

³⁴ Ali Murtadho, "Solusi Problem Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmu Dakwah*, 28 (2008) : 180-181, diakses 5 April 2016, <https://independent.academia.edu/mohammedniam>.

³⁵ Gregory Mankiw dkk, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 110

pengangguran yaitu orang yang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang mempunyai pekerjaan tapi belum memulai bekerja.³⁶

Berdasarkan ketenagakerjaan dan struktur pasar, pengangguran dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis diantaranya³⁷:

a. Pengangguran friksional (*frictional unemployment*)

Pengangguran friksional terjadi ketika seseorang meninggalkan pekerjaannya karena suatu alasan. Alasan tersebut dapat berupa jarak lapangan pekerjaan, gaji yang tidak sesuai, atau karena tidak sesuai dengan keinginan. Selain itu, pengangguran ini disebabkan oleh angkatan kerja tidak mengetahui adanya lowongan kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela. Sebagian besar pengangguran friksional termasuk pengangguran jangka pendek.

Pengangguran friksional terdapat dalam perekonomian yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*). Perekonomian dianggap mencapai tingkat

³⁶ BPS Kabupaten Sambas, "Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Sambas 2015", diakses 19 Maret 2018, <https://www.bps.go.id>.

³⁷ Ali Murtadho, *Formulasi Konsep Islam tentang Pembangunan Ekonomi Padat Penduduk (Analisis Pemikiran Fahm Khan)*, (DIPA IAIN Walisongo, Semarang, 2014). 27-30.

penggunaan tenaga kerja penuh apabila menganggur tidak melebihi 4% di mana kondisi ini masih dalam keadaan yang alamiah. Pengangguran jenis ini tidak menimbulkan masalah dan dapat diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi.

b. Pengangguran struktural (*structural unemployment*)

Pengangguran struktural terjadi karena tidak sinkronnya struktur angkatan kerja berdasarkan keterampilan atau jenis pekerjaan sehingga menimbulkan ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktur pasar barang yang pada awalnya barang laku keras dan tiba-tiba tidak laku dijual sehingga berimbas pada permintaan tenaga kerja barang tersebut. Selain itu, penyebab pengangguran struktural di negara berkembang antara lain ketidakmampuan dalam menciptakan lapangan kerja untuk seluruh angkatan kerja. Pengangguran seperti ini dapat diatasi dengan pelatihan tenaga kerja agar dapat menyesuaikan dengan pekerjaan yang ada.

c. Pengangguran siklikal (*cyclical unemployment*).

Pengangguran siklikal adalah pengangguran akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Pengangguran

ini banyak terjadi pada masa resesi³⁸. Hal ini mengakibatkan produsen mengurangi produksi. Pengurangan produksi berarti juga mengurangi *input* yang salah satunya adalah tenaga kerja. Pengangguran ini akan terus tumbuh seiring angkatan kerja semakin bertambah tetapi tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Pengangguran siklikal ini disebut juga pengangguran makroekonomi karena efek pengangguran ini tidak hanya menimpa beberapa industri saja tetapi berdampak pada keseluruhan ekonomi secara makro.

Berdasarkan ciri-ciri yang berlaku, pengangguran dapat dikelompokkan sebagai berikut³⁹ :

- a. Pengangguran terbuka (*open unemployment*), adalah akibat dari lowongan pekerjaan yang lebih kecil dibandingkan dengan penambahan tenaga kerja. Pengangguran ini juga dapat diakibatkan oleh kegiatan ekonomi yang menurun atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.
- b. Setengah pengangguran (*under unemployment*), adalah para tenaga kerja yang bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu atau satu atau empat jam dalam sehari.

³⁸ Resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun.

³⁹ Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, 330.

- c. Pengangguran tersembunyi, terutama terjadi pada sektor pertanian dan jasa. Pengangguran ini terjadi karena suatu kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.
- d. Pengangguran bermusim banyak terjadi di sektor pertanian dan perikanan, yaitu pengangguran di mana keadaan pengangguran hanya pada masa-masa tertentu dalam suatu tahunan. Misalnya pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaannya sehingga terpaksa menganggur.

Beberapa penyebab terjadinya pengangguran di antaranya⁴⁰ :

- a. Penduduk relatif banyak dibandingkan lapangan pekerjaan
Jumlah penduduk yang tinggi akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak sehingga jumlah angkatan kerja tidak tertampung dalam dunia kerja.
- b. Pendidikan dan keterampilan yang rendah
Pendidikan dan keterampilan yang rendah akan menghasilkan produktivitas yang rendah pula sehingga perusahaan tidak akan menerima pekerja yang akan merugikan perusahaannya. Selain itu pendidikan di

⁴⁰ Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 132-140.

Indonesia tidak fokus pada persoalan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan dunia kerja.

c. Teknologi yang maju

Teknologi yang tinggi tidak mengimbangi kemampuan manusia sehingga yang tidak menguasai teknologi tersebut akan tersingkir dalam persaingan.

d. Pengusaha yang ingin mengejar keuntungan

Perusahaan yang hanya berpikir rasionalis akan berusaha seoptimal mungkin dalam menggunakan tenaga kerja agar mencapai target sehingga tenaga kerja yang tidak bekerja tidak sesuai target akan dikeluarkan dari pekerjaannya.

e. Faktor individu

Faktor individu bisa disebabkan oleh sifat malas bekerja sehingga memperoleh gaji yang tidak layak. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh keadaan cacat fisik yang menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak.

Salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat akan mencapai maksimum jika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Dengan menganggur, sumber daya menjadi terbuang percuma. Tidak hanya produktivitas yang menurun, pendapatan masyarakat juga

akan berkurang sehingga dapat menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Mengukur jumlah pengangguran merupakan tugas BPS yang menghimpun dan mendata pengangguran dan aspek-aspek pasar tenaga kerja lain seperti jenis pekerjaan, jam kerja rata-rata, dan durasi pengangguran. BPS mengelompokkan orang dewasa ke dalam beberapa kategori di antaranya sebagai berikut⁴¹:

- a. Bekerja yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- b. Pengangguran yaitu seseorang yang berhenti bekerja sementara atau sedang mencari pekerjaan.
- c. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Setelah mengelompokkan seluruh individu ke dalam 3 kategori, BPS juga menghitung berbagai statistik untuk

⁴¹ Badan Pusat Statistik, “Tenaga Kerja,” diakses 1 Januari 2018, <https://www.bps.go.id>.

merangkum kondisi angkatan kerja dan tingkat pengangguran. Angkatan kerja adalah jumlah yang bekerja dan yang tidak bekerja⁴²:

Angkatan kerja = jumlah orang yang bekerja + jumlah yang tidak bekerja

Tingkat pengangguran adalah persentase pesentase angkatan kerja yang tidak bekerja :

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\text{jumlah orang yang tidak bekerja}}{\text{angkatan kerja}} \times 100\%$$

3. Pertumbuhan ekonomi dan korelasinya dengan kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi akan bertambah.⁴³ Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dengan sendirinya akan menetes ke bawah dalam menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang dikenal dengan teori *trickle down effect*. *Trickle down effect* dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1945), yang menjadi topik penting pembangunan ekonomi pada dekade 1950-an dan 1960-an.⁴⁴

Pada akhir tahun 1960-an, banyak pakar menyadari bahwa khusus negara berkembang, pertumbuhan tidak identik lagi

⁴² Gregory Mankiw dkk, *Pengantar Ekonomi Makro*, 111.

⁴³ Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, 9.

⁴⁴ Ahmad Solch, "Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2.2 (2014): 198, diakses 12 Mei 2018, <http://jurnal.unived.ac.id>.

dengan pembangunan, pertumbuhan yang tidak dibarengi dengan pengurangan kemiskinan. *Trickle down effect* yang dengan sendirinya menetes ke bawah khusus di negara berkembang kurang relevan karena asumsi *trickle down effect* saat akumulasi kapital di sektor modern akan memperkuat pertumbuhan sektor tersebut, kemudian membuka lapangan kerja baru⁴⁵.

Pada kenyataannya, keuntungan direinvestasikan ke peralatan yang lebih canggih daripada peralatan yang digunakan sebelumnya. Hal ini akan menyebabkan tidak adanya pengaruh terhadap penyediaan lapangan kerja baru. Fenomena tersebut menunjukkan keuntungan yang diperoleh pengusaha semakin meningkat, sementara jumlah pembukaan lapangan pekerjaan tidak mengalami perubahan.⁴⁶ Pertumbuhan ekonomi seperti ini tidak akan mengalami *trickle down effect* akan tetapi *trickle up effect* (efek muncrat ke atas), yaitu pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh kalangan orang kaya, tanpa membangun atau memerhatikan rakyat kecil. Agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata, harus diperhatikan distribusi atau redistribusi dari pertumbuhan ekonomi, dengan *pro poor* (keberpihakan dalam memerangi kemiskinan) melalui *pro job* (keberpihakan dalam lapangan kerja).

⁴⁵ Mudjarat Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 113.

⁴⁶ Mudjarat Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 113.

Pertumbuhan ekonomi perspektif Islam didefinisikan sebagai pertumbuhan terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kesejahteraan bagi manusia. Pembangunan ekonomi menurut Shadeq dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (*economic growth* -G), distribusi kekayaan (*distributive equity*-E) dan nilai-nilai Islam (*Islamic values* -V). Sehingga persamaan hubungan fungsionalnya⁴⁷ adalah:

$$D = f(G, E, V)$$

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang tinggi merupakan indikator ketersediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk mendapatkan kenyamanan dalam menjalani hidup. Hal ini tidak dilarang dalam Islam bahkan dianjurkan selama tidak tenggelam dalam buaian hawa nafsu yang membuat lupa kepada Allah. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang tinggi tidaklah cukup untuk menyediakan kebutuhan dasar dan kenyamanan hidup terhadap semua populasi manusia apabila tidak terdistribusi secara merata dan adil, di mana sekelompok tertentu saja yang menikmati pertumbuhan dan perkembangan pendapatan tersebut, sementara yang lain mengalami yang sebaliknya, mengalami kekurangan dan kemiskinan. Kondisi

⁴⁷ A.H.M Sadeq, "Economic Development in Islam", *Jurnal of Islamic Economics*, I. 1 (1987): 38, diakses 13 April 2018, journals.iium.edu.my.

tersebut tidak diinginkan oleh Islam. Justru Islam menganjurkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan di saat bersamaan menghendaki terjadinya distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sebagaimana dinyatakan di dalam Q.S. al-Hasyr: 7 berikut ini:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya

Kandungan ayat ini menjadi bukti bahwa Islam juga mengatur aspek kehidupan dalam distribusi kekayaan. Kekayaan yang diberikan Allah kepada manusia tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Pemerataan dalam distribusi kekayaan menjadi sebuah keharusan di dalam Islam. Jika masyarakat mengalami kesenjangan yang tinggi, maka negara

wajib mewujudkan konsep keseimbangan dalam masyarakat khususnya dalam pendistribusian kekayaan.⁴⁸

Menurut Beik, apabila dalam pertumbuhan ekonomi yang diproduksi adalah barang-barang memberikan efek buruk dan membahayakan manusia maka tidak termasuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekedar peningkatan volume barang dan jasa, namun terkait erat dengan keseimbangan dalam pendistribusian hasil pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi supaya bisa dirasakan oleh masyarakat luas maka pentingnya pendistribusiannya secara merata dan tidak mengalami ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan merupakan distribusi yang tidak proporsional dari pendapatan nasional total berbagai rumah tangga dalam negara. Dalam pengukuran ketimpangan pendapatan, biasanya digunakan koefisien gini. Koefisien gini merupakan ukuran sederhana mengenai tingkat relatif ketimpangan pendapatan suatu negara. Koefisien gini memiliki kisaran dari 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketimpangan sempurna). Koefisien gini 0-0,35 menunjukkan distribusi pendapatan relatif merata sedangkan lebih dari 0,36 menunjukkan distribusi pendapatan relatif timpang.⁴⁹

⁴⁸ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Premadei Group, 2015), 29.

⁴⁹ Michael P. Todaro, dkk, *Pembangunan Ekonom*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 253-257.

Mengeliminasi kesenjangan ekstrim antarkelompok masyarakat merupakan tugas negara dalam artian pemerintah lah yang bertanggung jawab agar terjadi aliran kekayaan dari hasil pertumbuhan ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin. Aliran kekayaan ini bisa melalui baragam instrumen kebijakan, seperti alokasi APBN (anggaran pendapatan dan belanja nasional), distribusi pajak, zakat, dan keuangan inklusif⁵⁰. Dengan demikian, pemerataan hasil pendapatan dapat seimbang sehingga tercipta stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dengan baik.⁵¹

Dalam perspektif ekonomi Islam, ada 3 faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di antaranya⁵².

- a. Sumber daya yang dapat diinvestasikan (*investible resources*)

Investible resources merupakan segala sumber daya yang dapat digunakan dalam menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber

⁵⁰ seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan inklusif ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan (dalam Booklet Keuangan Inklusif).

⁵¹ Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 40-41.

⁵² Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 23-27.

daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Sumber daya alam merupakan anugerah dari Allah yang disiapkan untuk manusia dalam menjalankan tugas sebagai khalifah-Nya di muka Bumi. Sumber daya modal dapat dioptimalkan *saving rate* di suatu negara. *Saving rate* dapat berupa tabungan masyarakat yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi.

b. Sumber daya manusia dan *entrepreneurship*

Sumber daya manusia *entrepreneur* mampu menggerakkan sektor riil dalam perekonomian dan menciptakan kemandirian negara, sebagaimana hadis nabi tentang pentingnya SDM yang entrepreneur :

" إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّارِ الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا ، وَإِذَا
اِثْمَنُوا لَمْ يَخُونُوا ، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا ، وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَذْمُوا ، وَإِذَا
بَاعُوا لَمْ يُطْرُوا ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا ، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا "

“Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengikarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila

menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan” (787)⁵³

c. Teknologi dan inovasi.

Technological progress merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi dapat menciptakan efisiensi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Adapun basis teknologi adalah inovasi. Inovasi merupakan dasar dari terlahirnya sebuah karya. Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa berinovasi. Rasulullah bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَزِفَ»

Sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya (al-mu'min al muhtarif). (1072)⁵⁴

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai produk domestik bruto (PDB) dan untuk wilayah/regional dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB menggambarkan kemampuan

⁵³ Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Alī ibn Mūsā al-Khusroujirdī al-Khurāsānī Abū Bakr al-Baihaqī, *Al-‘Adāb Li Al-Baihaqī*, Juz 1, 318 Maktabah Islamweb.

⁵⁴ Abū ‘abdillāh Muhammad ibn salāmah ibn Ja’far ibn ‘Alī ibn Hukmūn al-Qadhā’ī al-Mishriy, *Musnad al-Syihāb*, Juz 2, 148, Maktabah Syamilah.

suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.⁵⁵ Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antardaerah.

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada saat itu dan diukur setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai acuan dasar.⁵⁶ Adapun manfaat dari PDRB sebagai berikut⁵⁷:

- a. PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat

⁵⁵ Firmansyah, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas Menurut Pengeluaran 2011- 2015*, (Sambas: Badan Pusat Statistik Sambas, 2016), 2.

⁵⁶ Firmansyah, "Produk Domestik Regional," 2.

⁵⁷ Firmansyah, "Produk Domestik Regional," 4.

digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi.

$$\text{Struktur Ekonomi} = \frac{PDRB_{\text{sektor } i_t}}{\text{Total } PDRB_t} \times 100\%$$

- b. PDRB harga konstan (riil) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. Harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_i - PDRB_o}{PDRB_o} \times 100\%$$

Menurut BPS, angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.⁵⁸

- a. Pendekatan produksi (*production approach*)

Menurut pendekatan ini, PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit

⁵⁸ Firmansyah, "Produk Domestik Regional," 2-3.

produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, 2. pertambangan dan penggalian, 3. industri pengolahan, 4. pengadaan listrik dan gas, 5. pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, 6. konstruksi, 7. perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 8. transportasi dan pergudangan, 9. penyediaan akomodasi dan makan minum, 10. informasi dan komunikasi, 11. jasa keuangan dan asuransi 12. real estat, 13. jasa perusahaan, 14. administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, 15. jasa pendidikan, 16. jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 17. jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Pendekatan pendapatan (*income approach*)

Menurut pendekatan ini, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Menurut definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*)

Menurut pendekatan ini, PDRB merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) yang dapat dibuat persamaannya sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)^{59}$$

Keterangan:

C = Konsumsi Rumah tangga

I = Investasi

G = Belanja pemerintah

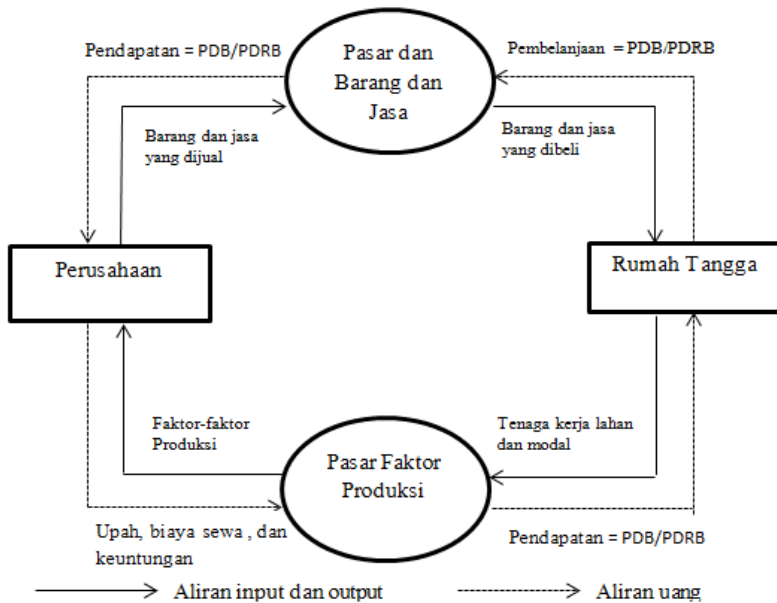
X = Ekspor

M = Impor

Secara teoritis, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran nilainya akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran nilainya akan sama dengan jumlah barang dan jasa

⁵⁹ Gregory Mankiw dkk, *Pengantar Ekonomi Makro*, 10

akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDB/PDRB mengukur dua hal sekaligus yaitu pendapatan dan pengeluaran seseorang, wilayah atau negara dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan setiap melakukan transaksi melibatkan penjual dan pembeli. Setiap uang yang dibelanjakan pembeli pasti menjadi pendapatan yang di terima oleh penjual⁶⁰, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3⁶¹. Arus Lingk ar Perekonomian

⁶⁰ Gregory Mankiw, “ Pengantar Ekonomi Makro, 5

⁶¹ Gregory Mankiw, “ Pengantar Ekonomi Makro , 5

Gambar 3 menjelaskan bahwa rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan, kemudian perusahaan mendapatkan hasil penjualan tersebut yang akan digunakan untuk membayar upah tenaga kerja, sewa tanah modal dan keuntungan bagi perusahaan. Jumlah PDB/PDRB akan sama dengan jumlah yang dibelanjakan oleh rumah tangga dari pasar. Jumlah PDB/PDRB juga akan sama dengan jumlah upah, sewa, modal, dan keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan di pasar faktor produksi. Dalam hal ini, uang mengalir dari rumah tangga ke perusahaan kemudian kembali lagi ke rumah tangga.

4. IPM dan keterkaitannya dengan kemiskinan

Manusia merupakan kekayaan suatu negara. Menurut Kuncoro, yang menjadi fokus utama dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas manusia.⁶² Di dalam konsep dasar pembangunan ekonomi Islam, sumber daya manusia juga menjadi fokus utama selain tauhid, *tazkiah an-nafs*, dan peran pemerintah. Begitu juga menurut Abdillah, manusia merupakan makhluk pembangunan yang merupakan mandataris Ilahi dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Pengertian tugas mandataris Ilahi yang dimaksud yaitu dalam melaksanakan pembangunan. Tolak ukur manusia berkualitas dapat dilihat dari

⁶² Mudjarajad Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan, Edisi 5*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), 117.

produksi dan hasil karya manusia itu sendiri⁶³ sehingga kualitas manusia harus diperhatikan untuk esensi dan kemajuan bangsa, sebagaimana pesan dalam Q.S. Hud: 61,

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ
غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا
إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ ﴿٦١﴾

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"

Dalam surat Hud ayat 61 di atas, dinyatakan bahwa manusia dijadikan Allah sebagai khalifah di muka Bumi yang mengemban tugas untuk memakmurkannya. Dalam konteks kehidupan manusia yang sesungguhnya, ayat tersebut dapat dipahami dengan melaksanakan pembangunan.⁶⁴ Setiap pembangunan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban sehingga untuk kemaslahatan hidupnya, manusia harus memastikan bahwa kegiatan pembangunan yang

⁶³ Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan*, 72-74

⁶⁴ Umar Capra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid Al Shariah*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008), 7.

dilakukannya bersifat ramah lingkungan. Dengan demikian, tampak adanya hubungan dialektis antara pembangunan dan manusia. Dalam hal ini manusia sebagai pemeran utama dalam pembangunan, yang menempatkan manusia sebagai objek sekaligus sebagai subjek dalam pembangunan.

Pada tahun 1990, ekonom Pakistan bernama Mahbubul Haq dan pemenang hadiah nobel India yaitu Amartya Sen menyatakan bahwa mengukur pembangunan tidak hanya dilihat dari pendapatannya saja tapi ada indikator lain yaitu pembangunan manusianya.⁶⁵ Sen menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai tujuan utama, tetapi pembangunan harus meningkatkan kualitas kehidupan yang manusia dan kebebasan yang dinikmati.

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia yaitu yang berkaitan dengan kebebasan manusia untuk memilih dan memperoleh lebih banyak kemampuan dan menikmati lebih banyak kesempatan untuk menggunakan kemampuan yang ada pada manusia dalam memenuhi kekayaannya,⁶⁶ untuk memenuhi kebutuhan dasar dan

⁶⁵ Eleonora Sofilda et al., "Human Development and Poverty in Papua Province (An Analysis of Simultaneous Approach on Panel Data Regression)", *OIDA International Journal of Sustainable Development* 06:06 (2013): 54, diakses 6 April 2018, <http://www.oidaijsd.com>

⁶⁶ United Nations Development Programme, "Human Development Report 2, 15 Work for Human Development", diakses 19 Mei 2018", <http://hdr.undp.org>.

memperbaiki tingkat eksistensi sebagai manusia.⁶⁷ Tujuan dari pembangunan adalah menjadikan lingkungan sehingga manusia dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan secara produktif dan mengakses segala sumber daya dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Dalam menentukan kualitas manusia, UNDP menggunakan *Human Development Index* (HDI) atau IPM.

IPM juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting terkait dengan kualitas hasil pembangunan ekonomi, yaitu tingkat perkembangan manusia. IPM pertama kali dipublikasikan oleh UNDP pada tahun 1990. IPM berfungsi untuk melihat kualitas pembangunan manusia antarwilayah di suatu negara, bahkan antarnegara.

Komposisi IPM berdasarkan tiga indikator yaitu kesehatan, pencapaian pendidikan, dan standar hidup (daya beli).

a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*).

Umur panjang dan hidup sehat dapat digambarkan oleh angka harapan hidup saat lahir (AHH). AHH saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat yang dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan”. Dalam Islam, kesehatan

⁶⁷ BPS Provinsi Kalbar, “IPM Tahun 2015”, diakses 3 Januari 2018, <https://kalbar.bps.go.id>

sangat diprioritaskan. Tidak mungkin melakukan aktivitas dalam keadaan tidak sehat. Di dalam al-Qur'an, terdapat ayat yang memerintahkan untuk menjaga kesehatan yang berkaitan dengan aktivitas konsumsi sebagaimana terdapat dalam surat 'Abasa ayat 24:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”

Ayat tersebut menganjurkan kita untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang baik untuk menunjang kehidupan yang sehat. Dengan kesehatan yang baik, manusia bisa beraktivitas secara optimal karena memiliki sumber tenaga yang lebih besar.

b. Pengetahuan (*knowledge*).

Indikator yang membangun pengetahuan yaitu rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) atau *mean years of schooling* (MYS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang diasumsikan rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Adapun cakupan penduduk yang masuk dalam penghitungan rata-rata lama sekolah yaitu penduduk yang berusia 25 tahun. Angka HLS merupakan lamanya sekolah oleh seluruh anak, dihitung

dari jumlah penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. HLS bertujuan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Manusia sebagai khalifah haruslah memiliki ilmu agar dapat melakukan pembangunan secara efektif dan efisien. Tidak mengherankan pada saat Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi rasul, Allah mewajibkan kepadanya untuk membaca seluruh jagad raya dengan nama Tuhan yang menciptakan. Sebagaimana dalam surat al-Alaq ayat 1-5:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”

Dengan membaca, manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus dapat mengolah sumber daya agar terpenuhinya kebutuhan pokok (*dharūriyyah*) dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah* dan *hajiyyat*). Jika manusia mampu menjaga dan memenuhi kebutuhan *daruriyahnya* maka

manusia dapat digolongkan sebagai manusia berkualitas yaitu manusia yang dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jika tidak dapat memenuhi maka dipastikan manusia itu berada dalam kekurangan dan tidak berkualitas⁶⁸. Islam sangat mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu sebagaimana dalam surat al-Mujādalah ayat 11:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dalam hadis, Rasulullah bersabda:

⁶⁸Titick Herwanti & Muhammad Irwan, “Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 17.2 (2013): 150, diakses 13 April 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.2235>.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Menuntut ilmu diwajibkan atas setiap muslim.”(HR. Al-Baihaqi, Ath-Thabrani).⁶⁹

c. Standard hidup layak (*decent standard of living*).

Indikator standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per tahun diperoleh dari susenas mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten/kota. Sedangkan perhitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas yang terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 komoditas nonmakanan. Paritas daya beli ini berfungsi untuk membandingkan harga antarwilayah.

Sebelum menghitung IPM, terlebih dahulu diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator sebagai berikut.

Tabel 4. Nilai Minimum dan Maksimum untuk Masing-Masing Indikator

Indikator	Minimum		Maksimum	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka harapan hidup saat lahir	20	20	85	85
Harapan lama sekolah	0	0	18	18
Rata-rata lama	0	0	15	15

⁶⁹Sahīb ‘Abdul Jabbār, *Al-Jāmi’ushshahīh Lissunan Wal Masānīd Juz 6*, (Maktabah Syamilah, 2014), 305.

sekolah				
Pengeluaran perkapita disesuaikan	100 (PPP-US)	1.007.436 (Rp)	107.721 (PPP US)	26.572.352 (Rp)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kemudian dihitung nilai indeksnya untuk masing masing indikator sebagai berikut⁷⁰:

Indeks Kesehatan

$$I_{kes} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Indeks Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{Min}}{HLS_{Maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pend} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Indeks Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{Ln_{pengeluaran} - Ln_{pengeluaran(min)}}{Ln_{pengeluaran maks} - Ln_{pengeluaran min}}$$

Kemudian dihitung nilai IPM sebagai rata-rata dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran dengan bentuk formula sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

⁷⁰ Badan Pusat Statistik

Menggunakan rata-rata geometrik dalam menghitung IPM dapat diartikan bahwa untuk mewujudkan pembangunan manusia tiga dimensi tersebut harus memperoleh perhatian yang sama besar dan sama pentingnya. Berdasarkan standar internasional, nilai IPM antarwilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

$IPM < 60$: IPM rendah

$60 \leq IPM < 70$: IPM sedang

$70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi

$IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi

B. Kajian Pustaka

Penelitian Ni Ketut Eni Endrayani dan Made Heny Urmila Dewi (2016) yang berjudul *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali* menyebutkan bahwa pengangguran merupakan variabel intervening antara inflasi dan kemiskinan di mana inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui pengangguran di Provinsi Bali. Kemudian secara parsial pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan penduduk merasa tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada sehingga menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai

atau lebih baik. Akibatnya peningkatan pengangguran ini tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.⁷¹

Penelitian yang dilakukan oleh Jumika (2012) berjudul *Analisis Pengaruh PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa PDRB di Provinsi Jawa Tengah tidak memengaruhi dalam penurunan kemiskinan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya melebihi 0,05. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi meningkat hanya pada sektor yang tidak menyerap banyak tenaga kerja seperti pertambangan dan galian. Sedangkan nilai IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai probabilitas 0,000 yang nilainya kurang dari 0,005.⁷²

Arini dan Made Dwi Setyadhi Mustika (2015) dengan judul penelitian yaitu *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan*. Arini dan dwi menjelaskan pertumbuhan ekonomi secara langsung dapat memengaruhi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Dengan nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,595 serta nilai *t* hitung sebesar 6,009 > *t* tabel sebesar 1,645, artinya

⁷¹ Ni Ketut Eni Endrayani dan Made Heny Urmila Dewi, “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”, *ISSN : 2337-3067, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.1 (2016) : 73-84, diakses 12 April 2018, <https://ojs.unud.ac.id>.

⁷² Jumika, “Analisis Pengaruh PDRB,” 78.

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan⁷³.

Tumpal Butar-Butar (2013) dengan judul penelitian *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Simalungun*. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan penduduk miskin di Kabupaten Simalungun karena koefisien regresinya (1,544) lebih kecil dari t-tabelnya 2,135. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif terhadap penduduk miskin di Kabupaten Simalungun di mana setiap peningkatan 1 jiwa pengangguran maka jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,018 jiwa dengan nilai t-hitungnya (2,832) lebih besar dari t-tabelnya (2,135). Adapun variabel IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ditandai dengan nilai t tabel (0,811) lebih kecil dibanding dengan nilai t-tabel (2,135).⁷⁴

Made Parwata, dkk (2016) melakukan sebuah penelitian tentang *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan*.

⁷³ Arini dan Made Dwi Setyadhi Mustika, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan", *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, ISSN: 2303-0178, 4.9 (2015) : 1155, diakses 12 April 2018, [ht.tps://ojs.unud.ac.id](http://ojs.unud.ac.id).

⁷⁴ Tumpal Butar-Butar, "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Simalungun", (Laporan Hasil Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen Medan, 2013), 51-53, diakses 12 April 2018, <https://perpustakaan.uhn.ac.id>.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kausal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan dengan sumbangan pengaruh sebesar 64,6%, secara parsial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dengan sumbangan pengaruh sebesar 47,3%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dengan sumbangan pengaruh sebesar 7,4%, serta pengaruh tidak langsung PDRB terhadap tingkat kemiskinan melalui pengangguran ialah sebesar -7,2%.⁷⁵

Nenny Latifah dkk (2017) dengan judul penelitian *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Dampaknya Pada Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Manado*. Penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM dan TPT secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penduduk miskin. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi tidak memengaruhi tingkat pengangguran terbuka, dikarenakan Pengangguran yang terjadi lebih kepada pengangguran

⁷⁵ Made Parwata, dkk. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan". *Jurnal Jurusan Manajemen*, 4.1 (2016): 8-9, diakses 12 April 2018, download.portalgaruda.org.

structural dan atau friksional, dan struktur perekonomian yang didominasi pemerintah, begitu juga dengan pasar tenaga kerja.⁷⁶

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini dikarenakan, pengangguran tidak hanya disebabkan oleh kualitas SDM, akan tetapi dikarenakan oleh keterbatasan lapangan kerja atau mungkin pekerjaan yang ada belum sesuai dengan minat menjadikan pengangguran terdidik bertambah. Adapun analisis jalur pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap penduduk miskin melalui pengangguran. Lain halnya dengan IPM memiliki pengaruh terhadap kemiskinan melalui pengangguran di Kota Manado.⁷⁷

Penelitian Santi Nurmainah, dengan judul *Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah ,Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah)* diperoleh bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat berpengaruh signifikan terhadap pengaruh jumlah pengangguran di Jawa Timur. Dan penelitian Santi Nurmainah bahwa Indeks

⁷⁶ Nenny Latifah dkk. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Dampaknya Pada Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Manado”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17.2 (2017): 116.

⁷⁷ Nenny Latifah dkk. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Dampaknya Pada Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Manado”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17.2 (2017): 116.

Pembangunan Manusia (IPM) signifikan negatif memengaruhi tingkat kemiskinan sebesar -0,694.⁷⁸

Selamat Siregar (2017), dengan judul penelitian *Pengaruh Pdrb Riil Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan Dengan Variabel Intervening Pengangguran*, dari penelitian ini diperoleh adanya pengaruh langsung PDRB riil secara signifikan dan bertanda positif terhadap pengangguran, begitu juga terhadap tingkat kemiskinan di Kota Medan. Dikarenakan pada saat terjadi peningkatan PDRB riil maka semakin besar ketimpangan. Selain itu, tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan. Jika suatu masyarakat belum bekerja atau menganggur maka pengangguran secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan suatu masyarakat yang secara otomatis juga akan memengaruhi tingkat kemiskinan. Untuk variabel intervening bahwa pengangguran merupakan variabel intervening antara PDRB riil terhadap kemiskinan.⁷⁹

Suliswanto (2010) dalam judul *pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap*

⁷⁸ Santi Nurmainah. “Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah ,Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah)”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 20.2, (2013) : 138-139, dikases 12 April 2018, <https://media.neliti.com>.

⁷⁹ Selamat Siregar, “Pengaruh Pdrb Riil dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan Dengan Variabel Intervening Pengangguran”, *Jurnal Ilmiah Mcthonomi* 3.2 (2017): 66-69, diakses 10 April 2018, <https://scholar.google.co.id>.

Angka Kemiskinan di Indonesia. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel yang paling berperan dalam menanggulangi kemiskinan adalah IPM. Sedangkan PDB tidak terlalu signifikan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Dikarenakan terjadinya ketimpangan dalam pendistribusian.⁸⁰

Arfan Poyoh dkk (2017) dengan judul penelitian *Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara*. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa PDRB tidak dapat memengaruhi dalam menurunkan tingkat pengangguran di Sulawesi Utara. Setiap PDRB mengalami kenaikan maka tingkat pengangguran juga akan mengalami kenaikan. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Okun yang dicetuskan oleh Mankiw.⁸¹

Made Parwata dkk (2016), dengan judul *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan*, dalam penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan antara PDRB terhadap pengangguran, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif

⁸⁰Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto. “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8.2 (2011) : 364, diakses 12 April 2018, <https://media.neliti.com>. (357-266).

⁸¹ Arfan Poyoh dkk (2017, “Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Utara”, *Agri-SosioEkonomiUnsrat, ISSN 1907– 4298*, 13.1A (2017) : 65, diakses 8 April 2018, <https://media.neliti.com>. (55 – 66).

dan signifikan terhadap kemiskinan, dan pengangguran merupakan variabel mediasi antara PDRB dan kemiskinan.⁸²

Neny Latifa dkk (2017) dengan judul *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Dampaknya Pada Jumlah Penduduk Miskin di Kota Manado*. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini dikarenakan pengangguran tidak hanya disebabkan oleh kualitas SDM, akan tetapi keterbatasan lapangan kerja atau mungkin pekerjaan yang ada belum sesuai dengan minat menjadikan pengangguran terdidik bertambah. Selanjutnya indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap penduduk miskin. Dalam memediasi pengangguran merupakan variabel intervening antara indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan, akan tetapi tidak memediasi antara pertumbuhan ekonomi jumlah penduduk Miskin di kota Manado.⁸³

C. Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Berpikir

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks sehingga perlu adanya analisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, akan dilihat pula pengaruh indeks

⁸² Parwata dkk, "Pengaruh Produk Domestik," 7.

⁸³ Latifah dkk. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi," 116.

pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui pengangguran.

1. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Pembangunan manusia diartikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” (proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat). Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Tiga komponen tersebut sangat berhubungan dengan produktivitas masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk menentukan kemajuan dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS tingginya IPM akan diikuti dengan rendahnya jumlah penduduk miskin.⁸⁴

Peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. Di samping pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan terhadap pertambahan pendapatan. Pengaruh kesehatan terhadap pendapatan diantaranya dengan perbaikan kesehatan penduduk akan

⁸⁴ Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*. (Badan Pusat Statistik: 2009),64-65

meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan dan pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan.⁸⁵

Beberapa riset telah banyak membuktikan bahwa IPM memengaruhi tingkat kemiskinan diantaranya: penelitian Sofilda dkk yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Papua.⁸⁶ Begitu juga dengan penelitian Silswanto bahwa IPM sangat berperan dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Indonesia, dengan demikian dapat dirumuskan bahwa:

H₁: IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan⁸⁷

2. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan

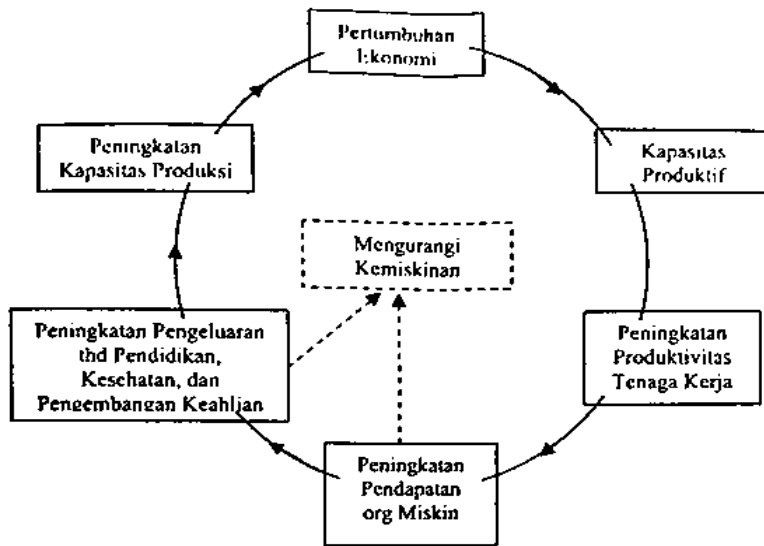
Sabagaimana teori *trickel down effect* pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai hubungan yang sangat kuat. Pertumbuhan ekonomi akan menaikkan permintaan terhadap *output*, menaikkan kapasitas produktif para pekerja, dan membuka lapangan kerja baru. Semua akan bermuara pada peningkatan pendapatan para pekerja. Peningkatan pendapatan akan

⁸⁵ Eka Pratiwi Lumbantoruan & Paidi Hidayat. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi)", *HidayatJurnal Ekonomi dan Keuangan*, .2.2 (2014): 18, diakses 13 April 2018, <https://media.neliti.com>.

⁸⁶ Sofilda et al., "Human Development and Poverty," 59.

⁸⁷ Berpengaruh negatif maksudnya memiliki pengaruh terbalik antara IPM dan tingkat kemiskinan, jika nilai IPM semakin tinggi maka akan menurunkan tingkat kemiskinan

berdampak pada peningkatan pengeluaran, seperti pengeluaran pendidikan, kesehatan dan pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Dengan demikian, makin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan⁸⁸ yang hubungannya dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

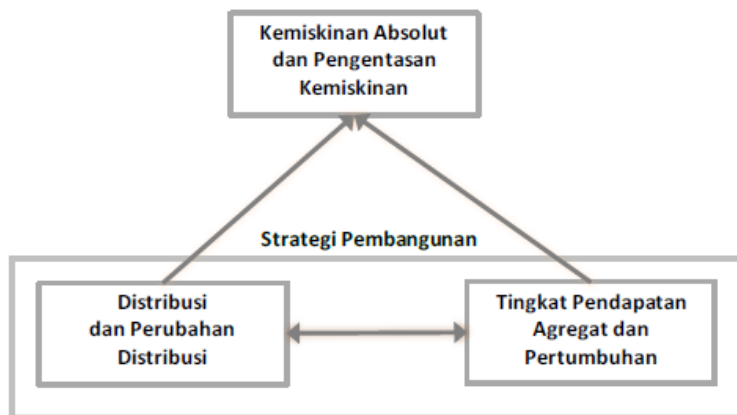


Gambar 4. Pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan⁸⁹

⁸⁸ Anggit Yoga Permana dan Fitrie Arianti. “Analisis Pengaruh Pdrb, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009”. *Diponegoro Journal Of Economics*, 1.1, (2012): 2, diakses 13 April 2018. <https://media.neliti.com>

⁸⁹ Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 65.

Bourguignon juga menggambarkan keterkaitan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan dalam bentuk segitiga seperti pada Gambar 4. Menurutnya, pengentasan kemiskinan merupakan fungsi dari pertumbuhan dan menambah tingkat pendapatan, distribusi pendapatan dan perubahan dalam distribusi pendapatan. Hal ini berarti, pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diikutsertakan pendistribusian pendapatan (redistribusi) sehingga meningkatkan level pendapatan.



Gambar 5. Segitiga pertumbuhan, ketimpangan dan kemiskinan⁹⁰

Beberapa riset telah banyak membuktikan bahwa PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, diantaranya: penelitian

⁹⁰ François Bourguignon. "The Poverty-Growth-Inequality Triangle", (NewDelhi: Research On International Economic Relations, 2004), 4

Pradeep Agrawal menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kazakhstan dapat mengurangi kemiskinan⁹¹. Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi berarti penjumlahan barang dan jasa yang diproduksi semakin meningkat yang diikuti dengan peningkatan tenaga kerja, yang mengakibatkan banyak penduduk yang memiliki penghasilan yang layak.

Penelitian Joko Susanto juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, dimana 1% peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kemiskinan sekitar 0,4%, *ceteris paribus*, dengan demikian dapat dirumuskan bahwa:

H₂: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan⁹²

3. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan

Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan kemakmuran masyarakat. Jika menganggur maka akan berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi pencapaian tingkat kemakmuran. Hal ini akan memberi peluang untuk terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu pendapatan berkurang maka

⁹¹ Pradeep Agrawal, "Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence From Kazakhstan", *Asean Development Review*, 24.2, (2008). 97, diakses 8 Maret 2018, <http://www.adb.org>.

⁹² Berpengaruh negatif maksudnya memiliki pengaruh terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan

akan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga berdampak kepada penurunan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak.

Jika pengangguran di suatu negara sangat buruk maka kekacauan politik dan sosial akan terjadi yang berakibat prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang sangat buruk. Hilangnya lapangan pekerjaan diikuti berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jika masalah pengangguran ini terjadi, maka kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

Terezia V. Pattimahu (2016) menyatakan bahwa pengangguran terbuka di provinsi Maluku memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Maluku. Apabila pengangguran meningkat sebesar 1% maka akan mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku sebesar 0.0045%. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu berada di antara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Sedangkan masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Setiap

orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya.⁹³

Penelitian Jamaliah dan Muhammad Said juga menunjukkan bahwa peningkatan ketenagakerjaan akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2012-2013,⁹⁴ dengan demikian dapat dirumuskan bahwa:

H₃: Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan⁹⁵

4. Pengaruh IPM terhadap kemiskinan yang dimediasi oleh pengangguran

Dalam konsep pembangunan ekonomi Islam manusia dipandang sebagai fokus utama dalam pembangunan yang dapat dilihat dari nilai IPM. IPM yang semakin meningkat menunjukkan bahwa kualitas manusia semakin meningkat. Hal ini akan meningkatkan produktifitas sehingga manusia bisa melakukan pembangunan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraannya.

⁹³ Terezia V. Pattimahu. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Maluku". *ISSN: 1978-3612*, X.1, (2016) : 47, diakses 13 April 2018, <https://ejournal.unpatti.ac.id>.

⁹⁴ Jmaliah & Muhammad Said, " The Effect of Employment Development Index on Economic Growth and Poverty level in Indonesia", *Problem and Perspectives in Management*, 15. (2017): 369, diakses 8 April 2018, <http://dx.doi.org>.

⁹⁵ Berpengaruh positif maksudnya memiliki pengaruh berbanding lurus antara pengangguran dan tingkat kemiskinan, jika nilai pengangguran semakin tinggi maka akan menaikkan tingkat kemiskinan

Beberapa riset telah menunjukkan bahwa IPM memengaruhi dalam penurunan tingkat pengangguran, yaitu penelitian Riza Firdhania dkk menyatakan bahwa IPM di Kabupaten Jember berpengaruh signifikan dalam mengurangi masalah pengangguran.⁹⁶ Selain itu, penelitian Nenny Latifa menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kota Manado melalui tingkat pengangguran terbuka dan bersifat negatif, dengan demikian dapat dirumuskan bahwa:

H₄: Tingkat Pengangguran memediasi antara IPM dan Kemiskinan⁹⁷

5. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yang dimediasi oleh pengangguran

Hukum O'kun mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat memengaruhi dalam mengurangi tingkat pengangguran. Jika setiap 2 persen kemerosotan GNP dari GNP potensialnya, tingkat pengangguran akan melonjak 1 persen.⁹⁸ Pertumbuhan ekonomi meningkat berarti jumlah barang dan jasa yang

⁹⁶ Riza Firdhania dkk, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, IV.1(2017) : 121. diakses 9 April 2018, <https://jurnal.uncj.ac.id>.

⁹⁷ Bahwa nilai IPM dapat memengaruhi dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui pengangguran

⁹⁸ Okun Darman, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran: Analisis Hukum, *Journal The Winners*, 14.1 (2013): 2, diakses 10 April 2018, Journal.Binus.Ac.Id.

diproduksi juga akan meningkat, hal ini akan membutuhkan banyak tenaga kerja.

Beberapa riset telah membuktikan bahwa penelitian Qamariah menunjukkan adanya pengaruh negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran begitu juga penelitian Hamidah Muhd Irpan dkk, bahwa di Malaysia berlaku hukum o'kun dimana Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dengan pengangguran.⁹⁹ Penelitian selamat siregar menunjukkan bahwa pengangguran memediasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran,¹⁰⁰ dengan demikian dapat dirumuskan bahwa:

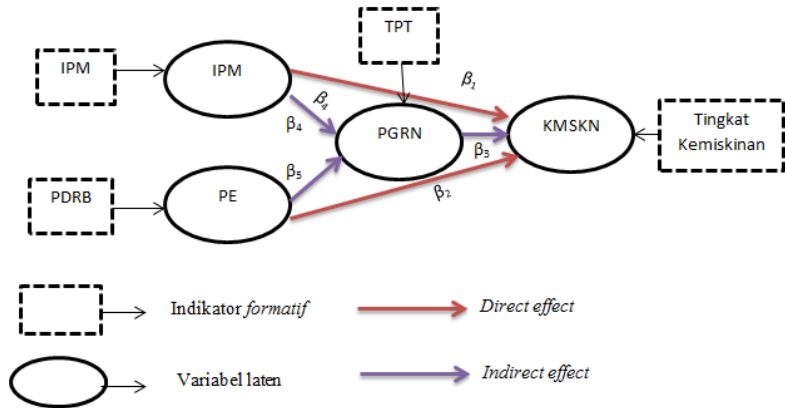
H₅: Tingkat Pengangguran memediasi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan¹⁰¹

Berdasarkan landasan teori , hasil penelitian terdahulu yang dikemukakan, dan hipotesis. Diperoleh secara ringkas kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut.

⁹⁹ Hamidah Muhd Irpan dkk, "Impact of Foreign Direct Investment on The Unemployment Rate in Malaysia", *Journal of Physics: Conference Series*, 7.10 (2016) :9 , diakses 10 April 2018, doi:10.1088/1742-6596/710/1/012028, <http://iopscience.iop.org>.

¹⁰⁰ Siregar, "Pengaruh Pdrb Riil," 69.

¹⁰¹ Bahwa nilai pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui pengangguran



Gambar 6. *Path analysis*

Keterangan

- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- PE = Pertumbuhan Ekonomi dengan variabel formatinya PDRB
- PGRN = Pengangguran
- KMSKN = Kemiskinan
- β = koefisien jalur

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kuantitatif. Dikatakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan variabel-variabel yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.¹ Selain itu, penelitian ini menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam bentuk angka dan menganalisis data dengan prosedur statistik.²

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dan eksplanasi. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan karena menjelaskan gambaran awal tentang besarnya variabel yang menjadi objek penelitian seperti tingkat kemiskinan, IPM, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran dari seluruh Provinsi di Indonesia. Selain itu dilakukan penggolongan variabel-variabel berdasarkan teori yang dikemukakan. Sedangkan pendekatan kuantitatif eksplanasi merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antarvariabel yang

¹ Jhonatan Sarwono, "Memadukan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif: Mungkinkah," *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 9.2 (2009), 119, diakses 30 Maret 2018, <https://media.neliti.com>.

² Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3.2(2016): 50, diakses 30 Maret 2018, <http://jurnal.unmer.ac.id>.

menjadi objek dalam penelitian³ seperti hubungan antara IPM, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yang ditunjukkan oleh tingkat signifikansi antarvariabel, baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menganalisis tentang kemiskinan beserta faktor-faktor yang memengaruhinya mencakup 33 provinsi yang ada di Indonesia (Kalimantan Utara tidak termasuk) dengan periode penelitian tahun 2013-2017. Pada periode ini tingkat kemiskinan mengalami fluktuatif padahal tingkat IPM dan jumlah PDB di Indonesia mengalami peningkatan.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini menggunakan sampel 33 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2013-2017. Pengambilan sampelnya⁴ menggunakan *purposive sampling*⁵. Hal ini dikarenakan

³ Riza Firdhania dkk, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, V.1 (2017) : 118. diakses 9 April 2018, <https://jurnal.unej.ac.id>

⁴ Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut

⁵ Teknik sampling yang digunakan yaitu karena pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu

salah satu provinsi (Kalimantan Utara) di Indonesia tidak diikuti sertakan dikarenakan data yang diperlukan dalam rentang periode ini tidak tersedia.⁶

D. Variabel Penelitian

Definisi operasional yaitu definisi yang didasarkan pada sifat-sifat objek yang didefinisikan dan dapat diamati, yang merupakan batasan dan penjelasan variabel yang digunakan.⁷ Dalam mengetahui pengukuran setiap variabel maka digunakan standar yang sudah dibuat oleh pemerintah sebagai *Ulil Amri*.

Menurut Abul Hasan ‘Alī, definisi ulil amri memiliki tiga pengertian yaitu al-umarā’, al-‘ulamā’, dan sahabat rasul.⁸ Al-umarā’ yang berarti pemimpin pemerintahan⁹ dalam konteks nasional adalah pemerintah yang berkuasa yaitu pemerintah Indonesia yang dalam hal ini BPS selaku badan resmi yang ditunjuk dan memiliki kewenangan menentukan standar kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, pemakaian definisi miskin berdasarkan standar BPS tidaklah bertentangan dengan konsep Islam karena terlepas dari tujuan kemaksiatan dan dapat dipergunakan untuk kemaslahatan. Adapun definisi operasional sebagai berikut:

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 135-144.

⁷ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 68.

⁸ Abul Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habīb al-Bashariy al-Baghdādiy, *Al-Hāwī Fī Fiqhi Asysyāfi’ī*, Juz 9, (Dārul Kitāb Al-‘Ilmiyyah, 1994), h, Maktabah Syamilah

⁹ KBBI

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen atau variabel tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas, variabel ini adalah variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas.¹⁰ Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan.

Pengertian kemiskinan begitu luas sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kemiskinan yang berkaitan dengan harta benda (menurut Yusuf Qardawi), merupakan orang-orang yang hidup di dalam standar tertentu yang jauh dari standar hidup pada umumnya di dalam masyarakat di suatu wilayah atau di seluruh dunia (sebagaimana pendapat al-Fanjiri), yang senada dengan pandangan Badan Pusat Statistik selaku lembaga yang bertugas dalam mengukur penelitian tingkat kemiskinan.

BPS mengartikan kemiskinan adalah orang yang berada di bawah garis kemiskinan¹¹. Kemiskinan yang dimasukkan sebagai variabel dalam satuan persentase. Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk dengan pengukuran kemiskinan absolut yang berada di bawah

¹⁰ Aziz Septiatin, dkk, "Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *I-Economic*, 2.1(2016): 56

¹¹ Lampiran 1

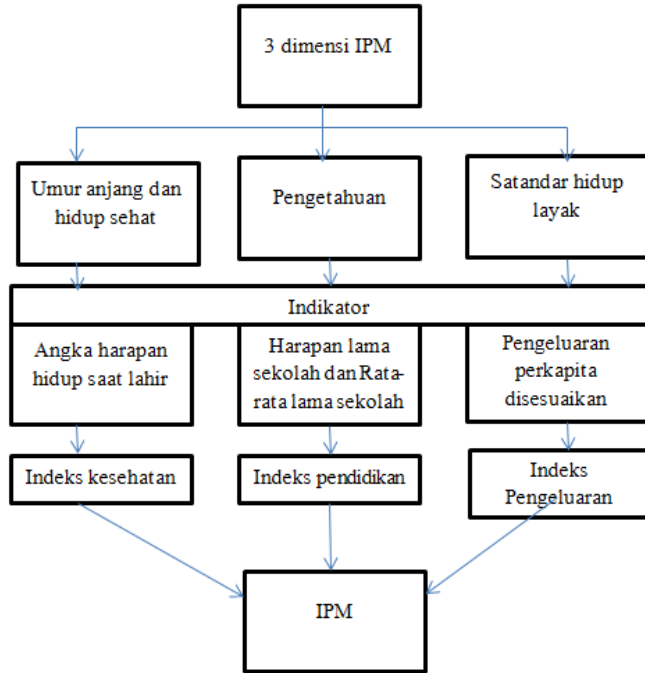
garis kemiskinan (GK), yang dihitung berdasarkan kriteria BPS yang disebut juga dengan istilah tingkat kemiskinan.

2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang variabelnya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menemukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Adapun variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ *Human Development Index (HDI)*

IPM merupakan indikator untuk mengukur kualitas hidup manusia. IPM merupakan gabungan dari 3 dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimana masing-masing dimensi tersebut dihitung nilai indeksnya, kemudian didapat nilai IPM dalam bentuk persen berdasarkan rumus geometri. Adapun perhitungan IPM sebagai berikut:



Sumber : BPS

Gambar 7. Dimensi pembentuk IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100\%^{12}$$

Keterangan :

$I_{kesehatan}$ = Indeks Kesehatan

$I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan

$I_{pengeluaran}$ = Indeks Pengeluaran.

¹² Badan Pusat Statistik

b. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu¹³. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai produk domestik bruto (PDB)/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu periode tertentu, dan dapat dilihat dari data atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu laju pertumbuhan ekonomi PDRB tiap provinsi dalam satuan persen dengan harga konstan 2010 menurut BPS.

c. Pengangguran

Menurut BPS pengangguran yaitu suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Pengertian tersebut termasuk pengangguran terbuka (*open unemployment*). Dalam penelitian ini digunakan data tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

¹³ Badan Pusat Statistik, “Laju Pertumbuhan PDB / PDRB,” diakses 25 Maret 2018, <https://Sirusa.Bps.Go.Id>

3. Variabel intervening (variabel antara)

Variabel ini yang secara teori berpengaruh pada fenomena yang dihadapi, tidak dapat dilihat, diukur, dimanipulasi, dampaknya harus disimpulkan berdasarkan variabel-variabel independen dan moderator terhadap fenomena yang diamati.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi variabel intervening adalah tingkat pengangguran terbuka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga pengumpulan data dalam penelitian ini secara langsung diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang bertanggung jawab langsung dengan presiden. Fungsi pokok BPS adalah sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional. Data sekunder yang digunakan adalah data panel yang terdiri data *time series* (data yang didasarkan pada periode terjadinya atau deret waktu) dan data *cross section* (data yang didasarkan pada berbagai wilayah yang diteliti dalam satu periode). Dalam penelitian ini data *cross section* yaitu 33 provinsi yang ada di Indonesia dan data *time series* adalah data periode 2013 dan 2017. Data panel sebenarnya hampir serupa dengan data *cross section* hanya

¹⁴ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013), 70.

saja bedanya data panel dikumpulkan dari beberapa tahun. Data panel memiliki beberapa kelebihan diantaranya¹⁵:

1. Dapat mengatasi masalah heterogenitas yang biasa terjadi pada data *time series* dan *cross section*
2. Penggunaan data panel akan memberikan lebih banyak observasi, sehingga dapat mengurangi kolinieritas antar variabel karena merupakan kombinasi antara variabel data *time series* dan *cross section*

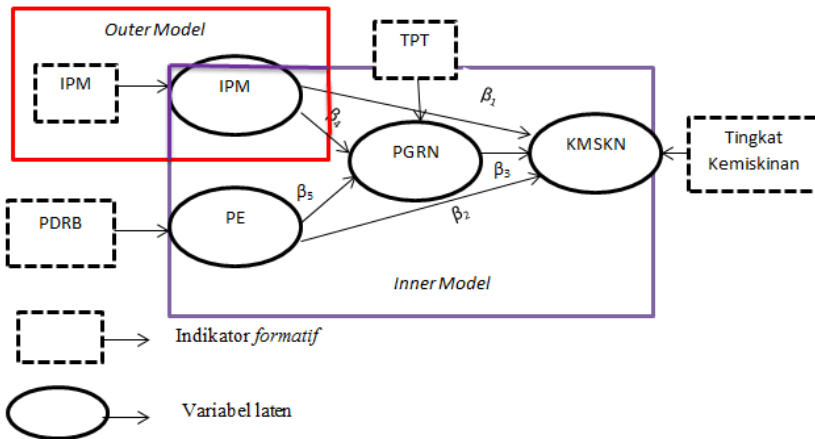
Tabel 5. Jenis Data dan Sumber Data

Variabel	Jenis Data	Sumber Data	Jumlah Observasi	Periode
IPM (%)	Sekunder	BPS Nasional	33 Provinsi	2013-2017
Laju PDRB (%)	Sekunder	BPS Nasional	33 Provinsi	2013-2017
Tingkat Pengangguran (%)	Sekunder	BPS Nasional	33 Provinsi	2013-2017
Tingkat Kemiskinan (%)	Sekunder	BPS Nasional	33 Provinsi	2013-2017

¹⁵ Hengky Latan dan Imam Ghazali. *Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program Warppls 5.0*. (Semarang: UNDIP, 2017), 360.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, model dianalisis menggunakan *path analysis* (analisis jalur) dengan bantuan *software* WarpPLS 5.0. *Software* WarpPLS didesain untuk analisis variabel laten (variabel yang tidak dapat di observasi secara langsung), dengan indikator-indikator yang mengukur variabel laten. Sedangkan penelitian ini dalam *path analysis*, variabel yang dianalisis bukan variabel laten tetapi variabel yang bersifat *observed* (variabel yang dapat diukur secara langsung). Cara mengatasi variabel *observed* yaitu membuat variabel laten dengan satu indikator yang bersifat *formatif* (indikator yang menjelaskan variabel laten yang diukur)¹⁶, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 8 . Konseptualisasi model

¹⁶ Latan dan Imam Ghazali, *Partial Least Squares*, 89-90.

¹⁶ Latan dan Imam Ghazali, *Partial Least Squares*, 338

Setelah membuat konseptualisasi model, selanjutnya evaluasi model. Ada dua tahapan dalam evaluasi model yaitu *outer model* (model yang menunjukkan antara indikator dengan variabel latennya) dan *inner model* (model yang menunjukkan antara variabel laten).¹⁷

1. Evaluasi model pengukuran (*outer model*)

Dalam penelitian ini indikator yang membangun variabel laten berbentuk *formatif*¹⁸ yang hanya memiliki satu indikator (variabel *observed*) sehingga yang tidak memerlukan uji dalam *outer model* seperti melihat *convergent validity*¹⁹, *composite reliability*²⁰ dan *discriminant validity*.²¹ Hal ini berbeda dengan variabel laten yang memiliki beberapa indikator yang membangunnya.

2. Evaluasi model struktural (*inner model*)

Menilai model struktural atau *Inner Model* dimulai dengan uji kecocokan model (*model fit*), R Square

- a. Uji Model Fit

Uji kecocokan model dilakukan sebelum menguji signifikansi *path coefficient* (koefisien jalur) dan R^2 . Uji *model fit* digunakan untuk mengetahui suatu model memiliki

¹⁷ Latan dan Imam Ghazali, *Partial Least Squares*, 15-16.

¹⁸ Variabel yang disusun oleh indikator yang dapat memengaruhi atau mengubah variabel yang dibentuknya jika mengalami perubahan.

¹⁹ Untuk menguji korelasi anatar indikator untuk mengukur konstruk

²⁰ Uji reliabilitas untuk penelitian yang menggunakan indikator reflektif.

²¹ Latan dan Imam Ghazali, *Partial Least Squares*, 89-90.

kecocokan dengan data, terdapat 3 indeks pengujian, yaitu *average path coefficient* (APC), *average R-squared* (ARS), *average varians factor* (AVIF), *Average full collinierity VIF* (AFVIF), dan Tenenhaus GoF. APC dan ARS diterima dengan syarat $p - value < 0.05$. AVIF dan AFVIF digunakan untuk *collinierity* di dalam model, dengan ukuran harus $\leq 3,3$. Untuk GoF menunjukkan kekuatan prediksi model (≥ 0.1 kecil, ≥ 0.25 moderate, ≥ 0.36 kuat).²²

b. *R-Square*

Melakukan uji *inner model*, dengan *R-square* untuk menjelaskan pengaruh variabel laten independen terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh atau tidak. Dalam konteks PLS batas maksimum R-Square yaitu 0.70. Jika lebih besar dari itu, maka kemungkinan mengalami problem kolineritas. Adapun kategori nilai *R-square* yaitu kuat (0,70), sedang (0,45), dan lemah 0,25.²³

G. Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya, dengan cara melihat signifikansi dan nilai *path coefficient* pada *direct effect*, dan *path coefficient* pada analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda. Metode ini

²² Latan dan Imam Ghazali, *Partial Least Squares*, 95-96

²³ Latan dan Imam Ghazali, *Partial Least Squares*, 91-92.

digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung (*direct effect*) maupun tidak langsung (*indirect effect*) antara variabel bebas terhadap variabel terikat.²⁴ Analisis jalur memungkinkan pengguna dapat menguji proporsi teoretis mengenai hubungan kausalitas tanpa memanipulasi variabel-variabel. Memanipulasi variabel yaitu memberikan perlakuan (*treatment*) terhadap variabel-variabel tertentu dalam pengukurannya. Asumsi dasar dalam analisis ini ialah beberapa variabel sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat dekat satu dengan yang lainnya.²⁵

Hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel independen dan dependen tercermin dalam koefisien jalur yang sesungguhnya merupakan koefisien regresi yang telah dibakukan (beta, β) yang diperoleh dari analisis regresi.²⁶ Dengan demikian analisis jalur bukan untuk menentukan hubungan penyebab satu variabel terhadap variabel lain, tetapi hanya menguji hubungan teori antarvariabel. Analisis jalur tidak menyediakan cara untuk melakukan spesifikasi model untuk membentuk teori baru, tetapi hanya sekedar

²⁴ Amos Neolaka, *Metode Penelitian Dan Statistik*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakary, 2014), 148.

²⁵ Meilen Greri Paseki, dkk, “ Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14 .3 (2014) : 39, diakses 25 Maret 2018, <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

²⁶ Tulus Winarsunu, *Statistik Dalam Penelitian Psikologi Dan Endidikan*, (Malang: Umm Pres, 2004), 281.

mengestimasi dampak variabel setelah model ditentukan berdasarkan teori yang ada.²⁷

Hasil korelasi dapat dilihat pada *path analysis* dan tingkat signifikansinya, yang kemudian dibandingkan dengan penelitian. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Jika tingkat signifikansi yang dipilih sebesar 5% maka tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan 0,05 untuk menolak suatu hipotesis. Dengan demikian yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu: $p\text{-value} < 0,05$, maka hipotesis diterima.

Program WarpPLS 5.0 dapat secara simultan menguji dan diketahui hasilnya dalam satu kali analisis regresi, dimana hasil secara langsung (*direct effect*), tidak langsung (*indirect effect*) dan pengaruh total (*total effect*) dapat diketahui secara otomatis. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. *Direct effect*

Persamaan secara langsung (*direct effect*) :

$$\text{KMSKN} = \beta_1\text{IPM} + \beta_2\text{PGRN} + \beta_3\text{PE} + e_1$$

2. *Indirect effect*

Secara tidak langsung (*indirect effect*) dapat dihitung dengan rumus :

²⁷ Agus widarjono, *Analisis Multivariat Terapan Dengan Spss, Amos, Dan Smartpls*, (, Jogjakarta : UPP STIM YKPN, 2015), 212-213.

- a. Pengaruh IPM terhadap kemiskinan melalui pengangguran = $\beta_4 \times \beta_2$.
- b. Pengaruh PE terhadap kemiskinan melalui pengangguran = $\beta_5 \times \beta_2$

3. *Total effect*

Untuk *total effect* :

- a. Total pengaruh IPM terhadap kemiskinan = $\beta_1 + \beta_4 \times \beta_2$
- b. Total pengaruh PE terhadap kemiskinan = $\beta_3 + \beta_5 \times \beta_2$

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan adanya efek mediasi:²⁸ diantaranya:

1. Ada hubungan yang signifikan antara variabel dependen dengan mediator (variabel intervening)
2. Ada hubungan yang signifikan antara variabel mediator dengan variabel independen
3. Hubungan antara variabel dependen dan independen menjadi tidak signifikan ketika variabel mediasi dimasukkan ke dalam model.

Dari tiga syarat di atas maka akan terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi yaitu variabel dikatakan intervening apabila variabel independen signifikan terhadap variabel dependen, kemudian variabel independen signifikan terhadap variabel mediasi, selanjutnya variabel mediator signifikan terhadap variabel dependen.

²⁸ Latan dan Imam Ghazali, *Partial Least Squares*, 198-199.

Model dikatakan tidak mempunyai efek mediasi, jika pengaruh *indirect effect* tidak signifikan, apakah antara variabel dependen ke variabel mediator atau antar variabel mediator ke variabel independen atau keduanya.

Model dikatakan mempunyai pengaruh efek mediasi sempurna, jika pengaruh langsung antara variabel dependen dan independen tidak signifikan, akan tetapi pengaruh tidak langsung semuanya signifikan baik antara variabel dependen ke variabel mediator begitu juga antar variabel mediator ke variabel independen.

Model dikatakan mempunyai efek mediasi sebagian apabila *direct effect* maupun *indirect effect* keduanya signifikan, akan tetapi nilai pengaruhnya berkurang saat memasukkan variabel mediasi.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Kemiskinan

Menurut BPS kemiskinan merupakan penduduk yang rata-rata pen geluaran per kapita dalam sebulan di bawah garis kemiskinan.¹ Adapun gambaran Tingkat Kemiskinan 33 provinsi di Indonesia sebagai berikut.

Tabel 6. Tingkat kemiskinan 33 provinsi di Indonesia periode 2013-2017 (%)

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	RataRata
Aceh	17.72	16.98	17.11	16.43	15.92	16.832
Sumatera Utara	10.39	9.85	10.79	10.27	9.28	10.116
Sumatera Barat	7.56	6.89	6.71	7.14	6.75	7.01
Riau	8.42	7.99	8.82	7.67	7.41	8.062
Jambi	8.42	8.39	9.12	8.37	7.9	8.44
Sumatera Selatan	14.06	13.62	13.77	13.39	13.1	13.588
Bengkulu	17.75	17.09	17.16	17.03	15.59	16.924
Lampung	14.39	14.21	13.53	13.86	13.04	13.806
Kc p. Bangka Belitung	5.25	4.97	4.83	5.04	5.3	5.078
Kep. Riau	6.35	6.4	5.78	5.84	6.13	6.1
Dki Jakarta	3.72	4.09	3.61	3.75	3.78	3.79
Jawa Barat	9.61	9.18	9.57	8.77	7.83	8.992
Jawa Tengah	14.44	13.58	13.32	13.19	12.23	13.352

¹ Lihat lampiran 1

Di Yogyakarta	15.03	14.55	13.16	13.1	12.36	13.64
Jawa Timur	12.73	12.28	12.28	11.85	11.2	12.068
Banten	5.89	5.51	5.75	5.36	5.59	5.62
Bali	4.49	4.76	5.25	4.15	4.14	4.558
NTB	17.25	17.05	16.54	16.02	15.05	16.382
NTT	20.24	19.6	22.58	22.01	21.38	21.162
Kalimantan Barat	8.74	8.07	8.44	8	7.86	8.222
Kalimantan Tengah	6.23	6.07	5.91	5.36	5.26	5.766
Kalimantan Selatan	4.76	4.81	4.72	4.52	4.7	4.702
Kalimantan Timur	6.38	6.31	6.1	6	6.08	6.174
Sulawesi Utara	8.5	8.26	8.98	8.2	7.9	8.368
Sulawesi Tengah	14.32	13.61	14.07	14.09	14.22	14.062
Sulawesi Selatan	10.32	9.54	10.12	9.24	9.48	9.74
Sulawesi Tenggara	13.73	12.77	13.74	12.77	11.97	12.996
Gorontalo	18.01	17.41	18.16	17.63	17.14	17.67
Sulawesi Barat	12.23	12.05	11.9	11.19	11.18	11.71
Maluku	19.27	18.44	19.36	19.26	18.29	18.924
Maluku Utara	7.64	7.41	6.22	6.41	6.44	6.824
Papua Barat	27.14	26.26	25.73	24.88	23.12	25.426
Papua	31.53	27.8	28.4	28.4	27.76	28.778
Indonesia	12.19	11.69	11.86	11.49	11.07	11.66

Sumber : BPS

Tabel di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori berdasarkan rata-rata tingkat nasional, yaitu provinsi yang tergolong di atas rata-rata nasional dan provinsi di bawah rata-rata nasional.

Tabel 7. Kategori Tingkat Kemiskinan di atas dan di bawah Rata-Rata Nasional pada periode 2013-2017.

Tahun	Provinsi di atas rata-rata nasional	Provinsi di bawah rata-rata nasional
2013	<p> Aceh Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Papua Barat Papua </p>	<p> Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Dki Jakarta Jawa Barat Banten Bali Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Maluku Utara </p>

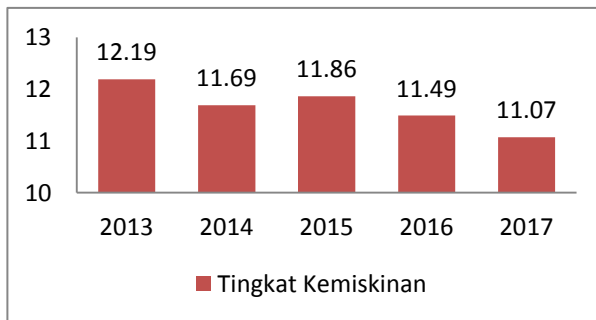
<p>2014</p>	<p>Acch Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Papua Barat Papua</p>	<p>Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Dki Jakarta Jawa Barat Banten Bali Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Maluku Utara</p>
<p>2015</p>	<p>Acch Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Papua Barat Papua</p>	<p>Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Dki Jakarta Jawa Barat Banten Bali Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Maluku Utara</p>

2016	<p>Acch Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Papua Barat Papua</p>	<p>Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Dki Jakarta Jawa Barat Banten Bali Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Maluku Utara Sulawesi Barat</p>
2017	<p>Acch Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Papua Barat Papua</p>	<p>Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Dki Jakarta Jawa Barat Banten Bali Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Maluku Utara</p>

Sumber: BPS yang diolah

Tabel 7 menunjukkan bahwa masih banyaknya wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi melebihi rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi tingginya tingkat kemiskinan pada wilayah tersebut. Jika kemiskinan ini semakin bertambah dan dibiarkan, maka orang-orang miskin ini akan terjatuh dalam lingkaran kemiskinan, pada akhirnya dapat menghambat pembangunan di Indonesia.

Selanjutnya rata-rata tingkat kemiskinan periode 2013-2017 dengan tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Papua sekitar 28.78%, kemudian disusul oleh Provinsi Papua Barat sekitar 25.43%. Besarnya tingkat kemiskinan ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah standar hidup layak di wilayah tersebut. Adapun tingkat kemiskinan terendah terdapat di DKI Jakarta sekitar 3.79%.



Sumber: BPS yang diolah

Gambar 9. Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2013-2017

Gambar 9, menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuatif akan tetapi secara umum trend tingkat kemiskinan mengalami penurunan, pada tahun 2013 mencapai 12.19% sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 11.07%, dengan rata-rata 11.66%.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan sebuah paradigma yang menempatkan manusia sebagai fokus utama, sebagai mandataris dalam pembangunan. Manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam pembangunan, memerlukan pembedayaan (*empowerment*) agar manusia tersebut dapat mengaktualisasikan segala potensinya.

UNDP mempublikasikan pembangunan manusia pada tahun 1990 dengan melihat nilai *Human Development Index* (IPM). Pengukuran ini berlangsung sampai sekarang, untuk membandingkan dan melihat kualitas manusia pada tiap negara, maupun wilayah.

IPM merupakan indikator dapat digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Terdapat empat kategori dalam menilai IPM antarwilayah yaitu:

$IPM < 60$: IPM rendah

$60 \leq IPM < 70$: IPM sedang

$70 \leq \text{IPM} < 80$: IPM tinggi

$\text{IPM} \geq 80$: IPM sangat tinggi

Adapun gambaran IPM 33 provinsi di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 8. IPM 33 Provinsi Periode 2013-2017

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
Acch	68.3	68.81	69.45	70	70.6	69.432
Sumatera Utara	68.36	68.87	69.51	70	70.57	69.462
Sumatera Barat	68.91	69.36	69.98	70.73	71.24	70.044
Riau	69.91	70.33	70.84	71.2	71.79	70.814
Jambi	67.76	68.24	68.89	69.62	69.99	68.9
Sumatera Selatan	66.16	66.75	67.46	68.24	68.86	67.494
Bengkulu	67.5	68.06	68.59	69.33	69.95	68.686
Lampung	65.73	66.42	66.95	67.65	68.25	67
Kep Bangka Belitung	67.92	68.27	69.05	69.55	69.99	68.956
Kep. Riau	73.02	73.4	73.75	73.99	74.45	73.722
DKI Jakarta	78.08	78.39	78.99	79.6	80.06	79.024
Jawa Barat	68.25	68.8	69.5	70.05	70.69	69.458
Jawa Tengah	68.02	68.78	69.49	69.98	70.52	69.358
DI Yogyakarta	76.44	76.81	77.59	78.38	78.89	77.622
Jawa Timur	67.55	68.14	68.95	69.74	70.27	68.93
Banten	69.47	69.89	70.27	70.96	71.42	70.402
Bali	72.09	72.48	73.27	73.65	74.3	73.158
Nusa	63.76	64.31	65.19	65.81	66.58	65.13

Tenggara Barat						
Nusa Tenggara Timur	61.68	62.26	62.67	63.13	63.73	62.694
Kalimantan Barat	64.3	64.89	65.59	65.88	66.26	65.384
Kalimantan Tengah	67.41	67.77	68.53	69.13	69.79	68.526
Kalimantan Selatan	67.17	67.63	68.38	69.05	69.65	68.376
Kalimantan Timur	73.21	73.82	74.17	74.59	75.12	74.182
Sulawesi Utara	69.49	69.96	70.39	71.05	71.66	70.51
Sulawesi Tengah	65.79	66.43	66.76	67.47	68.11	66.912
Sulawesi Selatan	67.92	68.49	69.15	69.76	70.34	69.132
Sulawesi Tenggara	67.55	68.07	68.75	69.31	69.86	68.708
Gorontalo	64.7	65.17	65.86	66.29	67.01	65.806
Sulawesi Barat	61.53	62.24	62.96	63.6	64.3	62.926
Maluku	66.09	66.74	67.05	67.6	68.19	67.134
Maluku Utara	64.78	65.18	65.91	66.63	67.2	65.94
Papua Barat	60.91	61.28	61.73	62.21	62.99	61.824
Papua	56.25	56.75	57.25	58.05	59.09	57.478
Indonesia	67.45	67.96	68.57	69.16	69.75	68.58

Sumber : BPS

Pada tabel 8 dapat dikategorikan tiap-tiap provinsi, apakah masuk dalam kategori rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Kategori IPM tiap Provinsi di Indonesia Periode 2013-2017.

Tahun	Provinsi kategori rendah	Provinsi kategori sedang	Provinsi kategori tinggi	Provinsi kategori sangat tinggi
2013	Papua	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kep Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT, KalBar, KalTim, KalSel, SulUt, SulTengah, SulSel, SulTengg, Gorontalo, SulBar, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat	Kep. Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali Kalimantan Timur	-
2014	Papua	Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kep Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT, KalBar, KalTim, KalSel, SulUt, SulTengah, SulSel, SulTengg, Gorontalo, SulBar, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat	Riau, Kep. Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali Kalimantan Timur	
2015	Papua	Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kep	Riau, Kep. Riau, DKI Jakarta, DI	

		Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, KalBar, KalTim, KalSel, SulTengah, SulSel, SulTengg, Gorontalo, SulBar, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat	Yogyakarta, Bali Kalimantan Timur Banten Sulawesi Utara	
2016	Papua	Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung Kep Bangka Belitung Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, KalBar, KalTim, KalSel, SulTengah, SulSel, SulTengg, Gorontalo, SulBar, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat	Sumut, Sumbar, Aceh, Riau, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali Kalimantan Timur, Banten, Sulawesi Utara,	-
2017	Papua	Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung Kep Bangka Belitung NTB, NTT, KalBar, KalTim, KalSel, SulTengah, SulTengg, Gorontalo, SulBar, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat	Sumut, Sumbar, Aceh, Riau, Kep. Riau, , Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali Kalimantan Timur, Banten, SulSel, Sulawesi	DKI Jakarta

			Utara,	
--	--	--	--------	--

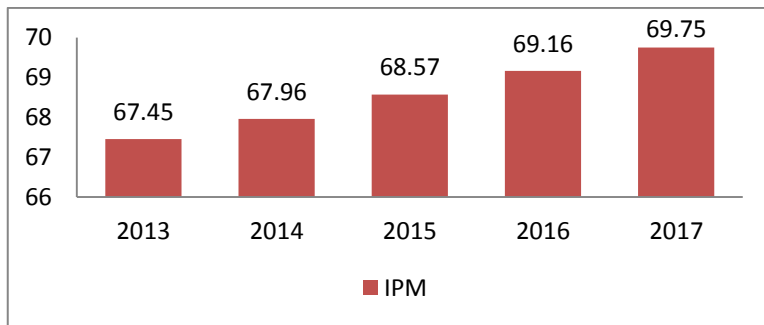
Sumber: BPS yang di olah

Pada tabel 9, bahwa sebagian besar nilai IPM Provinsi di Indonesia kategori sedang, dan pada tahun 2017 hanya satu yang memiliki IPM sangat tinggi yaitu DKI Jakarta, sedangkan Papua selalu dalam kategori rendah. Jika periode 2013-2017 di rata-ratakan, Provinsi Papua yang mempunyai tingkat IPM yang sangat rendah, dengan rata-rata IPM tahun 2013-2017 sekitar 57,48%. Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat memiliki tingkat IPM sedang dengan rata-rata antara 60-70%. Sedangkan Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kep Riau, Riau dan Sumatera Barat memiliki IPM yang tinggi dengan rata-rata 70-80% .

Kemajuan pembangunan manusia paling cepat terdapat pada tiga provinsi, yaitu Provinsi Papua (1,79 persen), Provinsi Papua Barat (1,25 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (1,17 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat didorong oleh dimensi standar hidup

layak, sedangkan NTB, lebih dikarenakan perbaikan dimensi pendidikan dan standar hidup layak.²

Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2013 hingga 2017. IPM Indonesia meningkat dari 67,45 pada tahun 2013 menjadi 69,75 pada tahun 2017, terlihat pada gambar 1 di bawah ini.



Sumber: BPS yang di olah

Gambar 10. IPM di Indonesia 2013-2017

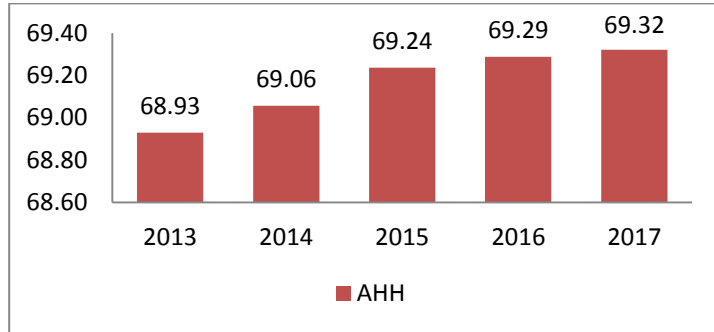
Tiga dimensi yang membentuk IPM dalam pencapaian pembangunan manusia juga mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017 sebagai berikut:

- a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat

Dimensi ini digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan perkiraan banyak tahun yang

² Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2017, diakses 29 Mei 2018, www.bps.go.id

ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Selain itu AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



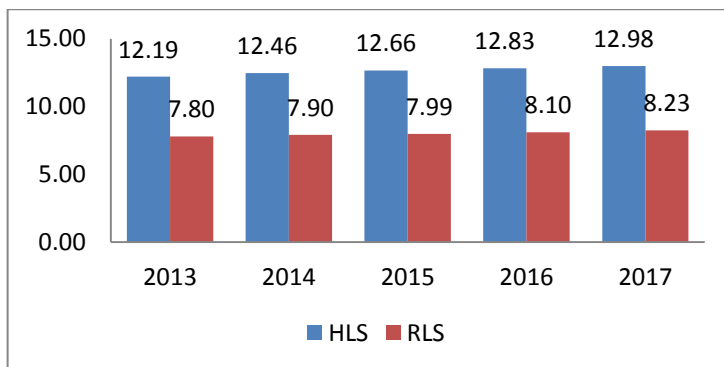
Sumber: BPS yang di olah

Gambar 11. Angka Harapan Hidup di Indonesia 2013-2017

Gambar 11 bahwa pada tahun 2013 umur harapan hidup sekitar 68.93 tahun kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 69.32 tahun, berarti harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat 1 tahun pada tahun 2017 dari tahun 2013, kurang lebih 69 tahun.

b. Dimensi pengetahuan

Dimensi pengetahuan dibentuk oleh dua indikator, diantaranya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun 2013-2017, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS yang diolah

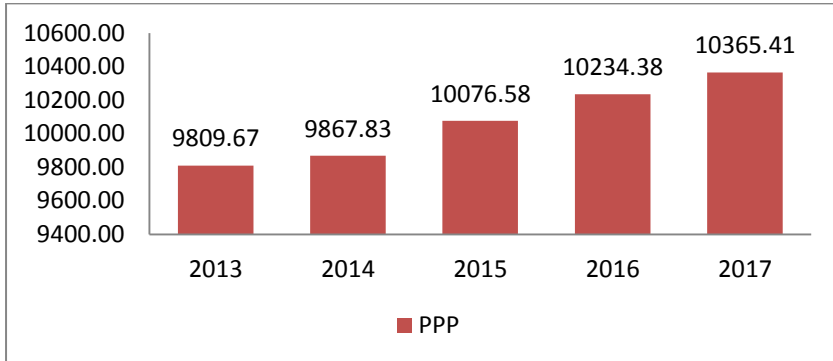
Gambar 12. Harapan Lama Sekolah di Indonesia 2013-2017

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada gambar 3, bahwa rata-rata lama sekolah tahun 2013 mencapai 7.8 tahun kemudian meningkat pada tahun 2017 mencapai 8,23 tahun. Hal ini berarti penduduk Indonesia menamatkan sekolah sampai kelas VIII atau kelas IX. Begitu juga dengan harapan lama sekolah tahun 2017, telah mencapai 12,98 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau Diploma 1.

c. Dimensi standar hidup layak

Dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran perkapita pertahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 kurang lebih sekitar 9,8

juta kemudian meningkat pada tahun 2017 pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia mencapai Rp10,37 juta per tahun, dapat di lihat pada gambar 4 di bawah ini.



Sumber: BPS yang diolah

Gambar 13. Pengeluaran perKapita/Tahun di Indonesia 2013-2017

Tiga dimensi yang membentuk IPM, bahwa pencapaian pembangunan manusia jika di rata-ratakan seluruh provinsi Tingkat IPM setiap tahun di Indonesia mengalami kenaikan dan pada tahun 2013-2017 Indonesia secara keseluruhan memiliki IPM tergolong sedang. Semakin meningkatnya IPM, baik pemerintah maupun masyarakat sangat memerhatikan kualitas manusia sebagai modal dalam pembangunan manusia.

3. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*)

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, akan terjadi *trickle-down effect* pada

kondisi ekonomi. Dalam penelitian ini untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi menggunakan nilai PDRB tiap provinsi dengan harga konstan 2010. PDRB merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Melalui PDRB, dapat diketahui bagaimana kondisi perekonomian suatu daerah. Tabel berikut ini akan menyajikan data laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan tahun 2010 di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2017.

Tabel 10. Laju Pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan 2010 tiap provinsi di Indonesia periode 2013-2017 (satuan %)

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
Aceh	2.61	1.55	-0.73	3.31	4.19	2.186
Sumatera Utara	6.07	5.23	5.1	5.18	5.12	5.34
Sumatera Barat	6.08	5.88	5.52	5.26	5.29	5.606
Riau	2.48	2.71	0.22	2.23	2.71	2.07
Jambi	6.84	7.36	4.2	4.37	4.64	5.482
Sumatera Selatan	5.31	4.79	4.42	5.03	5.51	5.012
Bengkulu	6.07	5.48	5.13	5.3	4.99	5.394
Lampung	5.77	5.08	5.13	5.15	5.17	5.26
Kep Bangka Belitung	5.2	4.67	4.08	4.11	2.01	4.014
Kep. Riau	7.21	6.6	6.01	5.03	2.01	5.372
DKI Jakarta	6.07	5.91	5.89	5.85	6.22	5.988
Jawa Barat	6.33	5.09	5.04	5.67	5.29	5.484
Jawa Tengah	5.11	5.27	5.47	5.28	5.27	5.28

DI Yogyakarta	5.47	5.17	4.95	5.05	5.26	5.18
Jawa Timur	6.08	5.86	5.44	5.55	5.45	5.676
Banten	6.67	5.51	5.4	5.26	5.71	5.71
Bali	6.69	6.73	6.03	6.24	5.59	6.256
Nusa Tenggara Barat	5.16	5.17	21.77	5.82	0.11	7.606
Nusa Tenggara Timur	5.41	5.05	5.03	5.18	5.16	5.166
Kalimantan Barat	6.05	5.03	4.86	5.22	5.17	5.266
Kalimantan Tengah	7.37	6.21	7.01	6.36	6.74	6.738
Kalimantan Selatan	5.33	4.84	3.83	4.38	5.29	4.734
Kalimantan Timur	2.76	1.71	-1.21	-0.38	3.13	1.202
Sulawesi Utara	6.38	6.31	6.12	6.17	6.32	6.26
Sulawesi Tengah	9.59	5.07	15.52	9.98	7.14	9.46
Sulawesi Selatan	7.62	7.54	7.17	7.41	7.23	7.394
Sulawesi Tenggara	7.5	6.26	6.88	6.51	6.81	6.792
Gorontalo	7.67	7.27	6.22	6.52	6.74	6.884
Sulawesi Barat	6.93	8.86	7.39	6.03	6.67	7.176
Maluku	5.24	6.64	5.48	5.76	5.81	5.786
Maluku Utara	6.36	5.49	6.1	5.77	7.67	6.278
Papua Barat	7.36	5.38	4.15	4.52	4.01	5.084
Papua	8.55	3.65	7.47	9.21	4.64	6.704
Indonesia	6.1	5.44	5.79	5.40	5.12	5.57

Sumber: BPS

Dari tabel 10 maka akan dikelompokkan provinsi yang berada di bawah dan di atas laju pertumbuhan nasional pada periode 2013-2017, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Kelompok pertumbuhan ekonomi di atas dan di bawah rata-rata Nasional pada periode 2013-2017.

Tahun	Provinsi dengan Laju Pertumbuhan di bawah rata-rata Nasional	Provinsi dengan Laju Pertumbuhan di atas rata-rata Nasional
2013	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kep Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, KalBar, KalTim, KalSel, Maluku, DKI Jakarta, DI Yogyakarta	Jambi, Kep. Riau, Bali, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Banten, Bali, KalTeng, SulUt, SulTengah, SulSel, SulTengg, Gorontalo, SulBar, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
2014	Aceh, Sumut, Riau, Sumsel, Bengkulu, Kep Bangka Belitung, Jawa Tengah, NTB, NTT, KalBar, KalTim, KalSel, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, SulTengah, Papua, Papua Barat,	Sumbar, Lampung, Jambi, Kep. Riau, Bali, Kalimantan Timur, Banten, Bali, KalTeng, SulUt, SulSel, SulTengg, Gorontalo, SulBar, Maluku Utara, Jawa Timur, Maluku,
2015	Aceh, Sumut, Riau, Sumsel, Bengkulu, Kep Bangka Belitung, Jawa Tengah, NTT, KalBar, KalTim, KalSel, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa	Sumbar, Lampung, Jambi, Kep. Riau, Bali, Kalimantan Timur, Bali, KalTeng, SulUt, SulSel, SulTengg, Gorontalo, SulBar, Maluku Utara, NTB,

	Barat, Papua Barat, Jawa Timur, Banten, Maluku,	SulTengah, Papua,
2016	Aceh, Sumut, Riau, Sumsel, Bengkulu, Kep Bangka Belitung, Jawa Tengah, NTT, KalBar, KalTim, KalSel, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Papua Barat, Banten,	Sumbar, Lampung, Jambi, Kep. Riau, Bali Kalimantan Timur, Bali, KalTeng, SulUt, SulSel, SulTengg, Gorontalo, SulBar, Maluku Utara, NTB, SulTengah, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku,
2017	Aceh, Riau, Jambi, Kep. Riau, Bengkulu, Kep Bangka Belitung, NTB, KalTim,	Bali Kalimantan Timur, Jawa Barat, Lampung, Banten, Bali, KalTeng, SulUt, SulTengah, SulSel, SulTengg, Gorontalo, SulBar, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumut, Sumsel, KalSel, Maluku, NTT, KalBar, DI Yogyakarta Sumbar, dan Papua.

Sumber: BPS yang di olah

Laju pertumbuhan PDRB untuk mengetahui kegiatan ekonomi tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia. Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 2013-2017 yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah yaitu terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sekitar 1.2%, kemudian disusul oleh Riau dan Aceh sekitar 2 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat di provinsi Sulawesi Tengah sekitar 9.46%. Indonesia secara

keseluruhan memiliki laju pertumbuhan mengalami fluktuatif dari periode 2013-2017.

Jika di lihat pada tabel 10, masih besarnya kesenjangan pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi di Indonesia. Menurut Beik pertumbuhan ekonomi yang baik apabila terdistribusi secara merata, supaya dirasakan oleh masyarakat luas. Terutama antara kalimantan Timur, Riau, Aceh dengan Sulawesi Tengah.

4. Pengangguran (*Unemployment*)

Kebanyakan orang dalam mempertahankan hidupnya dengan mengandalkan mata pencaharian. Bekerja merupakan kewajiban agama setelah beribadah, sebagaimana firman Allah surah al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung

Kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar hidup. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya membantu rakyatnya dalam membuka lapangan kerja agar terhindar dari banyaknya pengangguran di wilayah yang bersangkutan. Dalam hal ini, harus adanya sinergis peran antara individu, masyarakat, dan negara (pemerintah). Pemerintah harus mewajibkan warganya untuk bekerja, sebagaimana Allah mewajibkan pada hambaNya.

Pemerintah harus dapat menyediakan fasilitas lapangan kerja dan memberikan peluang dalam berwiraswasta, baik itu dengan cara memberikan keterampilan dan modal, agar setiap masyarakat dapat memperoleh pekerjaan.

Teori Okun menyatakan bahwa pengangguran akan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, jika semakin besar tingkat pengangguran maka akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Pengangguran juga akan mengurangi pendapatan yang akan mengakibatkan kepada kemiskinan. Adapun gambaran tingkat pengangguran terbuka 33 provinsi di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 33 Provinsi di Indonesia Periode 2013-2017 (satuan %)

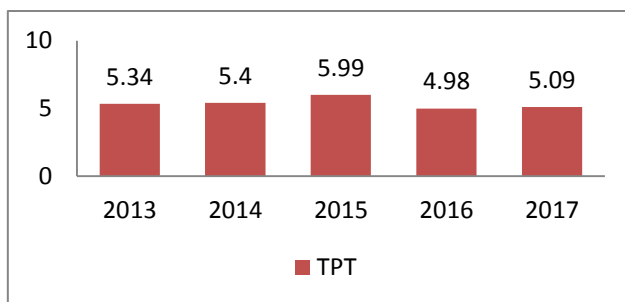
Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
Aceh	10.12	9.02	9.93	7.57	6.57	8.64
Sumatera Utara	6.45	6.23	6.71	5.84	5.60	6.17
Sumatera Barat	7.02	6.50	6.89	5.09	5.58	6.22
Riau	5.48	6.56	7.83	7.43	6.22	6.71
Jambi	4.76	5.08	4.34	4.00	3.87	4.41
Sumatera Selatan	4.84	4.96	6.07	4.31	4.39	4.92
Bengkulu	4.61	3.47	4.91	3.30	3.74	4.01
Lampung	5.69	4.79	5.14	4.62	4.33	4.91
Kep Bangka Belitung	3.65	5.14	6.29	2.60	3.78	4.29
Kep. Riau	5.63	6.69	6.20			

				7.69	7.16	6.67
DKI Jakarta	8.63	8.47	7.23	6.12	7.14	7.52
Jawa Barat	9.16	8.45	8.72	8.89	8.22	8.69
Jawa Tengah	6.01	5.68	4.99	4.63	4.57	5.18
DI Yogyakarta	3.24	3.33	4.07	2.72	3.02	3.28
Jawa Timur	4.30	4.19	4.47	4.21	4.00	4.23
Banten	9.54	9.07	9.55	8.92	9.28	9.27
Bali	1.83	1.90	1.99	1.89	1.48	1.82
Nusa Tenggara Barat	5.30	5.75	5.69	3.94	3.32	4.80
Nusa Tenggara Timur	3.25	3.26	3.83	3.25	3.27	3.37
Kalimantan Barat	3.99	4.04	5.15	4.23	4.36	4.35
Kalimantan Tengah	3.00	3.24	4.54	4.82	4.23	3.97
Kalimantan Selatan	3.66	3.80	4.92	5.45	4.77	4.52
Kalimantan Timur	7.95	7.38	7.50	7.95	6.91	7.54
Sulawesi Utara	6.79	7.54	9.03	6.18	7.18	7.34
Sulawesi Tengah	4.19	3.68	4.10	3.29	3.81	3.81
Sulawesi Selatan	5.10	5.08	5.95	4.80	5.61	5.31
Sulawesi Tenggara	4.38	4.43	5.55	2.72	3.30	4.08
Gorontalo	4.15	4.18	4.65	2.76	4.28	4.01
Sulawesi Barat	2.35	2.08	3.35	3.33	3.21	2.86
Maluku	9.91	10.51	9.93	7.05	9.29	9.34
Maluku Utara	3.80	5.29	6.05			

				4.01	5.33	4.90
Papua Barat	4.40	5.02	8.08	7.46	6.49	6.29
Papua	3.15	3.44	3.99	3.35	3.62	3.51
Indonesia	5.34	5.40	5.99	4.98	5.09	5.36

Sumber: BPS

Tabel 12 menunjukkan bahwa TPT rata-rata tahun 2013-2017 paling besar yaitu pada provinsi Maluku dan Banten dengan nilai rata-rata lebih dari 9%. Adapun yang paling rendah nilai TPT nya terdapat di provinsi di Bali sekitar 1.82% kemudian terendah no 2 yaitu provinsi Sulawesi Barat sekitar 2,86%. Wilayah yang masih tergolong tingkat pengangguran yang alami diantaranya Bali, Sulawesi Barat, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, dan DI Yogyakarta karena tingkat pengangguran <4%, selain wilayah tersebut tergolong tinggi. Secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS yang di olah

Gambar 14 . Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2013-2017

Di Indonesia tingkat pengangguran terbuka secara umum berfluktuatif sepanjang periode 2013-2017 dengan rata-rata 5,36% tergolong pengangguran tinggi. Cenderung mengalami penurunan kecuali pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 5.99%, hal ini berhubungan dengan perlambatan pada pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi mengalami perlambatan (dapat dilihat pada tabel 10), yang mengakibatkan banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), tercatat pada tahun 2015 jumlah total PHK 43.085 orang.³ Selain itu angkatan kerja mengalami peningkatan, kurang lebih 507.090 orang, dimana angkatan kerja pada tahun 2014 sekitar 121.872.931 kemudian bertambah pada tahun 2015 sekitar 122.380.021⁴, sehingga lapangan kerja yang ada tidak mampu menyerap tenaga kerja secara penuh.

B. Analisis Data dan Pembuktian Hipotesis

Analisis data menggunakan *path analysis* untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen secara *direct effect* dan *indirect effect*. Pengolahan data menggunakan WarpPLs, 5.0, yang dapat menghitung secara otomatis nilai *direct effect* dan *indirect effectnya*. Data yang akan dianalisis yaitu data time series 2013

³Lani Pujiastuti, 43.085 Pekerja di RI Terkena PHK. Diakses 8 Juni 2018, <https://finance.detik.com>

⁴ Badan Pusat Statistik, Keadaan Kondisi Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2017, (BPS: Jakarta, 2017), 45, diakses 2 Juni 2018, www.bps.co.id.

sampai 2017, dan data *cross section* dengan 33 provinsi di Indonesia. Variabel-variabel yang akan diolah dalam program warpPLs yaitu IPM, TPT, PDRB, dan tingkat kemiskinan pada periode 2013-2017.

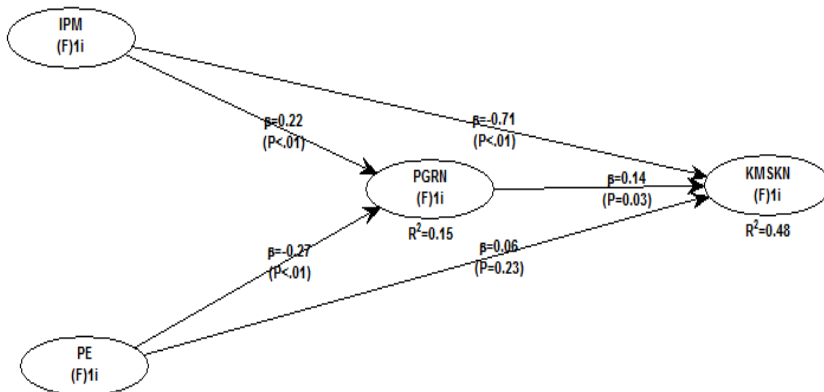
Adapun tahapan dalam evaluasi pada program WarpPLs diantaranya:

1. Evaluasi *Outer Model*

Penelitian ini tidak melalui tahap evaluasi *outer model* karena hanya memiliki satu indikator yang dapat disebut dengan variabel *observeb*.

2. Evaluasi *Inner Model*

Sebelum melangkah pada pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan evaluasi model (*inner model*). Evaluasi *inner model* meliputi *model fit*, dan R-square. Adapun output model struktural uji hipotesis sebagai berikut:



Gambar 15. Output model struktural pengolahan data dengan WarpPLs

a. *Model fit* dapat dilihat dari nilai *output general result*

Tabel 13. Hasil Output General Result

Kriteria	Indeks	<i>p-value</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
APC	0.279	$P < 0.001$	$P \leq 0.05$	Diterima
ARS	0.317	$P < 0.001$	$P \leq 0.05$	Diterima
AARS	0.307	$P < 0.001$	$P \leq 0.05$	Diterima
AVIF	1.104	-	≤ 3.3	Diterima
AFVIF	1.498	-	≤ 3.3	Diterima
GoF	0.563		≥ 0.1 (kecil), ≥ 0.25 (menengah), ≥ 0.36 (besar)	Prediksi model kuat.

Sumber: data yang diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memiliki model fit karena semua nilai APC, ARS, AARS, dan GoF memenuhi syarat (*rule of thumb*). Selain itu, model dalam penelitian ini tidak ada masalah multikolonieritas karena nilai AVIF dan AFVIF ≤ 3.3 .

b. R-Square

Kemudian untuk melihat kekuatan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen akan dilihat nilai R-Square. Gambar 15 di atas, menunjukkan nilai R-Square kemiskinan 0.48 yang berarti variabel Tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel IPM, PE, dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), sebesar 48% hal ini berarti 52% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model. Jika dikategorikan, maka

model struktural dalam penelitian ini tergolong sedang. Untuk pengangguran nilai R squarenya sekitar 15% dipengaruhi oleh variabel IPM dan PE, sisanya 85% di jelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

3. Uji hipotesis

Pembuktian hipotesis akan dilihat nilai signifikansi dan nilai *path coefficient* pada *direct effect* antarvariabel dependent dan independen. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansinya menggunakan 5%. Berdasarkan pada gambar 14, dapat dilihat *path coefficient* dan *p value* nya sebagai berikut:

Tabel 14. *Path coefficients and p values* pada *direct effect*

Hipotesis	Konstruk	Koefisien jalur	P value	Standar errors	Kesimpulan
H ₁	IPM→kemiskinan	-0.71	P<0.001	0.067	Diterima
H ₂	PE→kemiskinan	0.057	P=0.23	0.077	Ditolak
H ₃	PGRN→kemiskinan	0.14	P=0.035	0.076	Diterima

Sumber: data yang diolah

Pengujian pengaruh tidak langsung antara IPM dan tingkat kemiskinan melalui pengangguran dapat dilihat signifikansi (lihat gambar 14) antar jalur dan nilai path koefisien jalur. Adapun hasil *Indirect effect* sebagai berikut:

Tabel 15. *Indirect effect* dengan variabel PGRN (Tingkat pengangguran Terbuka) sebagai variabel intervening

Hipotesis	Konstruk	Koefisien jalur	Kesimpulan
H ₄	IPM→PGRN→Kemiskinan	0.031	Diterima
H ₅	PE→PGRN→kemiskinan	-0.037	Diterima

Sumber: data yang diolah

Pengaruh total merupakan jumlah pengaruh secara keseluruhan antara *direct effect* dan *Indirect effect* dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 16. *Total effect*

	<i>Total effect</i>
Pengaruh total IPM terhadap tingkat kemiskinan	-0.678
Pengaruh total pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan	0.020

Sumber: data yang diolah

4. Interpretasi Model

Path coefficient untuk *direct effect* dapat diartikan sebagai berikut:

$$\text{KMSKN} = \beta_1\text{IPM} + \beta_2\text{PGRN} + \beta_3\text{PE} + e$$

$$\text{KMSKN} = -0.71\text{IPM} + 0.057\text{PE} + 0.14\text{PGRN} + e$$

a. Pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan

Berdasarkan output pada gambar 15 dan tabel 14, tampak bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien jalur -0.71 dan signifikan dengan probabilitas <0.001 karena tingkat probabilitas kurang

dari 5% dengan standar error 0.067. Hal ini menunjukkan jika nilai IPM meningkat 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 0.71%, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Berkurangnya tingkat kemiskinan karena IPM yang meningkat mengindikasikan bahwa IPM dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian Sofilda dkk, menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Papua. Begitu juga dengan Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa tingginya IPM akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin.

Manusia merupakan agen perubahan dan pembangunan. Oleh sebab itu, orientasi yang benar ketika perubahan dan pembangunan semakin tumbuh atas hasil upaya dirinya adalah disebabkan partisipasi dan bantuan orang lain bukan atas jasanya sendiri.⁵ Fokus utama bagi upaya pembangunan bahkan ruh pembangunan itu sendiri adalah manusia.⁶ Sebagaimana dalam surat Hud 61 bahwa

⁵ Aidit Ghazali, *Development: An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1990), 23.

⁶ Ghazali, *Development: An Islamic Perspective*, 23.

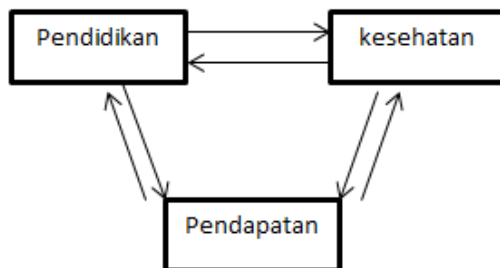
tugas manusia sebagai khalifah, yang bertugas memakmurkan bumi.

Menurut Abdillah memakmurkan bumi (*al-ardl*) sama halnya manusia harus memakmurkan/mengelola lingkungan secara baik dan benar agar tidak rusak dan bisa berkelanjutan.⁷ Pengelolaan lingkungan yang lazim diidentikkan dengan pembangunan. Manusia merupakan hal yang utama dikarenakan manusia sebagai subjek sekaligus sebagai objek dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, manusia harus mendapat perhatian khusus demi kemajuan suatu bangsa dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menanamkan sikap *Tauhid* dan *tazkiyyah an-nafs* dalam dirinya.

IPM terdiri dari 3 dimensi (kesehatan, pendidikan, dan hidup layak pendapatan perkapita) yang sangat menentukan kualitas manusia. Pendidikan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemampuan dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas dalam mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan. Selain itu, kesehatan merupakan syarat dalam meningkatkan produktivitas, karena dengan kesehatan, pendidikan mudah di capai. Dalam hal ini kesehatan dan pendidikan merupakan komponen penting

⁷ Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Alquran*, (Jakarta : Paramadina, 2001), 46

pembangunan ekonomi dalam membantu mengurangi kemiskinan. Dengan pendidikan dan kesehatan maka pendapatan tinggi akan mudah di dapat. Begitu sebaliknya dengan pendapatan tinggi maka akan mudah mengeluarkan dana untuk kesehatan dan pendidikan.



Gambar 16. Hubungan kausalitas 3 dimensi IPM

Dalam hal ini, pemerintah tetap mempertahankan dalam meningkatkan IPM untuk membangun kualitas hidup manusia dalam memerangi kemiskinan. Dengan memerhatikan ketiga dimensi yang membentuk IPM, penelitian ini menyatakan bahwa nilai IPM cenderung dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

b. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan

Berdasarkan output pada gambar 15 dan tabel 14, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dalam menurunkan tingkat kemiskinan dikarenakan nilai probabilitas 0.23 yang melebihi tingkat

probabilitas 5% (0.05). Jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka tidak akan berdampak dalam pengurangan jumlah penduduk miskin selama periode tersebut. Apabila pertumbuhan ekonomi terjadi, pendapatan masyarakat miskin tidak mengalami perubahan yang dapat mengubah pendapatannya di atas garis kemiskinan.

Ini dikarenakan tidak tersebarnya dalam pendistribusian hasil pembangunan secara adil kepada seluruh wilayah di Indonesia sehingga perekonomian yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang atau wilayah tertentu saja. Padahal distribusi ekonomi merupakan hal yang sangat urgen karena dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menjamin keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan, dan mengeliminasi kesenjangan ekstrim antarkelompok masyarakat.

Selain itu, nilai rasio gini di Indonesia tergolong masih tinggi karena melebihi 0,35⁸ yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 17. Gini Rasio di Indonesia periode 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Gini Rasio	0.406	0.414	0.402	0.394	0.391

Sumber: BPS

⁸ Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 257.

Tingginya gini rasio menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi kurang memberikan manfaat kepada orang-orang miskin, dan pertumbuhan tersebut juga tidak dihasilkan oleh orang banyak. Dalam konteks Islam, pertumbuhan ekonomi dikatakan baik apabila terjadi keseimbangan dalam pendistribusiannya, supaya tidak terjadi kesenjangan di antara individu maupun wilayah. Distribusi ini harus menjadi wilayah dan kewenangan negara agar dapat dilaksanakan dengan baik dan bersifat mengikat bagi seluruh rakyat. Negara harus menjamin adanya aliran kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin melalui berbagai instrumen kebijakan seperti zakat, pajak, dan lain-lain, agar tercapai stabilitas sosial, ekonomi, dan politik sebagaimana dalam Qs. al-Hasr ayat 7 “

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

“..., supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

Hasil penelitian ini ternyata tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan di awal yakni pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan atau apa yang disebut dengan teori *trickle down effect* yang artinya adalah kemajuan perekonomian yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan terciptanya

distribusi hasil perekonomian yang secara merata. Dalam hal ini, implikasinya pertumbuhan ekonomi akan dirasakan oleh orang kaya terlebih dahulu, kemudian baru menetes ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya.

Akan tetapi apabila hasil dari pertumbuhan ekonomi berupa keuntungan dari kegiatan ekonomi direinvestasikan untuk peralatan penunjang produksi yang lebih canggih, tidak peralatan seperti yang digunakan sebelumnya sehingga bersifat menghemat tenaga kerja (*labor saving*). Dalam hal ini, tenaga kerja yang digunakan tidak mengalami perubahan sehingga tidak akan berpengaruh terhadap penyediaan lapangan kerja.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang tidak langsung antara pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Dengan strategi *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor*. Strategi ini, untuk meminimalisir ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin, yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh orang kaya saja, dan hanya berputar di kalangan mereka saja.

Hasil penelitian ini bertentangan juga dengan penelitian Joko Susanto yang menyatakan bahwa adanya pengaruh

negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, penelitian ini konsisten dengan Jumika yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

c. Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan output pada gambar 15 dan tabel 14, pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien jalur 0.14 dan signifikan dengan probabilitas 0.035 karena tingkat probabilitas kurang dari 5%. Artinya, jika nilai pengangguran meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sekitar 0.14%, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Dengan demikian, semakin besar tingkat pengangguran, semakin besar pula tingkat kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini sesuai dengan hipotesis bahwa pengangguran sangat memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Terezia V. Pattimahu (2016) menyatakan bahwa pengangguran terbuka di Provinsi Maluku memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku.

Pengaruh tingkat pengangguran yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan dari penelitian ini menunjukkan

bahwa pengangguran merupakan indikator yang sangat terkait langsung dengan pendapatan. Masyarakat yang menganggur, pasti tidak memiliki pendapatan dari pekerjaan, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemakmuran dalam memenuhi kebutuhan. Apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, maka mereka termasuk dalam kategori miskin.

Dalam memenuhi kebutuhan, manusia dituntut untuk bekerja sebagaimana dijelaskan di dalam surat at-Taubah ayat 105. Dengan demikian, Islam bukanlah agama yang hanya menuntut umatnya untuk beribadah semata melainkan menempatkan bekerja dalam porsi yang penting dan menolak umatnya menganggur sebagaimana dijelaskan di dalam surat al-Jumu'ah ayat 10. Melalui ayat tersebut, manusia diwajibkan untuk bekerja setelah melakukan ibadah dalam rangka mencari karunia Allah rezeki di muka bumi ini.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٥﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Kebutuhan yang banyak dan beragam membuat masyarakat dituntut untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selain mengandalkan kemampuan individu dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya,

pemerintah juga harus bekerja keras dalam mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

Islam memandang istilah kerja menyangkut berbagai aktifitas kegiatan manusia baik yang bersifat badaniah maupun rohaniah untuk mewujudkan atau menambah suatu manfaat yang dibolehkan secara syar'i. Ketika seseorang tidak mau mempergunakan potensinya maka itulah pengangguran yang sangat berbahaya baik dirinya maupun masyarakatnya karena orang yang demikian merupakan penganggur yang memikul dosa. Akan tetapi, jika seseorang yang terus memfungsikan potensinya seperti kecerdasan, skill, modal, tenaga, dan sebagainya maka orang tersebut berpotensi menjadi produktif dan mampu meraih penghasilan dari apa yang dilakukannya sekalipun dalam pekerjaan dakwah dan ibadah.

d. Tingkat pengangguran memediasi antara ipm dan kemiskinan

Berdasarkan output pada gambar 14, bahwa hubungan tidak langsung (*indirect effect*) antara IPM terhadap tingkat pengangguran signifikan, kemudian tingkat pengangguran terhadap kemiskinan juga signifikan, sehingga disimpulkan bahwa pengangguran dapat memediasi antara IPM dan

kemiskinan. IPM dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui pengangguran sebesar 0.031 (lihat pada tabel 9).

Nilai koefisien jalur tidak langsung ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai koefisien jalur secara langsung dalam pengurangan kemiskinan. Dimana koefisien jalur secara langsung antara IPM dan kemiskinan sebesar 0.71. Hal ini berarti bahwa mengurangi tingkat kemiskinan secara langsung berdampak lebih besar. Secara total Pengaruh IPM dalam memengaruhi tingkat kemiskinan sebesar 0.678 (lihat tabel 10), dengan memasukkan variabel mediasi semakin mengurangi pengaruh antara IPM dan tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan, IPM yang memiliki tiga dimensi salah satunya yaitu pendidikan, apabila pendidikan di Indonesia semakin tinggi tapi tidak diringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai, maka tidak akan mampu mengurangi pengangguran akan tetapi malah sebaliknya, semakin besar pendidikan maka akan semakin besar pula pengangguran.

e. Tingkat Pengangguran Memediasi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.

Berdasarkan output pada gambar 15, bahwa hubungan tidak langsung (*indirect effect*) antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran signifikan ditandai dengan p value $\bar{0.01}$ (signifikansi 0.05), kemudian tingkat pengangguran terhadap kemiskinan juga signifikan pada p

value 0.03 (signifikansi 0.05), sehingga disimpulkan bahwa pengangguran dapat memediasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui pengangguran sebesar 0.037 (lihat pada tabel 9).

Pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, akan tetapi pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan melalui tingkat pengangguran. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan bekerja, rakyat/seseorang dapat menambah penghasilan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan, jika mampu memaksimalkan daya kreasi secara efisien dan produktif pada rakyatnya. Caranya dengan mendirikan usaha yang padat karya, agar rakyat berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu dengan memberikan peluang untuk malakukan wirausaha, dengan memberikan program pelatihan kewirausahaan dan memberikan bantuan sarana usaha. Dalam ekonomi Islam, Beik mengatakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang dapat memecahkan

masalah kemiskinan adalah faktor manusia yang *enterpreunship*. Hal ini dikarenakan sumber manusia *enterpreneur* mampu menggerakkan sektor riil dalam perekonomian, dan dapat menciptakan kemandirian negara.

Dalam hal ini, butuh peran pemerintah dalam mewujudkan, distribusi hasil pertumbuhan ekonomi agar dapat dirasakan oleh khalayak ramai, seperti mengalokasikan sumber daya alam dengan baik, agar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, mengalokasikan APBN (anggaran pendapatan belanja negara) seperti meningkatkan program keluarga dan harapan, kredit usaha rakyat, selanjutnya menggalakkan dan mendistribusikan zakat.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, variabel dependen hanya terfokus kepada jangka panjang, dan hanya memiliki 3 variabel saja, sehingga R-square yang dihasilkan cukup kecil yaitu sekitar 47% saja. Dengan demikian perlu ada tambahan variabel di luar IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran, yang diperkirakan lebih besar dampaknya dalam memengaruhi tingkat kemiskinan dalam periode 2013-2017.

Penelitian ini, tidak memasukkan variabel yang memengaruhi tingkat kemiskinan dalam jangka pendek (seperti inflasi). Supaya dapat melihat seberapa besar pengaruh baik jangka panjang maupun jangka pendek terhadap tingkat kemiskinan.

Selain itu, penelitian ini berfokus hanya pada data dari Badan Pusat Statistik, sehingga tidak ada perbandingan dalam pengukuran tingkat kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab 4 dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaruh IPM terhadap Tingkat Kemiskinan

IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien jalur -0.71 . Hal ini menunjukkan jika nilai IPM meningkat 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 0.71%, mengindikasikan bahwa IPM dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Sebagaimana firman Allah dalam QS Hud ayat 61 bahwa manusialah yang bertugas memakmurkan bumi, sehingga manusia harus memiliki bekal untuk memakmurkannya. Adapun bekal yang harus dimiliki diantaranya kesehatan, pendidikan dan harta, yang ketiga hal itu termasuk dalam dimensi IPM.

2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dikarenakan nilai probabilitas 0.23 yang melebihi tingkat probabilitas 5%, Jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka tidak akan berdampak dalam pengurangan jumlah penduduk miskin selama periode tersebut. Hal ini mengindikasikan masih terjadinya

ketimpangan dalam pendapatan. Dalam konteks Islam, pertumbuhan ekonomi yang baik apabila adanya keseimbangan dalam pendistribusiannya, supaya tidak terjadi kesenjangan di antara individu maupun wilayah

3. Pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan

Pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien jalur 0.14, dan signifikan dengan probabilitas 0.035 karena tingkat probabilitas kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan jika nilai pengangguran meningkat 1% maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sekitar 0.14% satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hal ini diartikan bahwa semakin besar tingkat pengangguran, maka akan diiringi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan.

4. Pengaruh IPM terhadap kemiskinan melalui pengangguran

Hubungan langsung (*direct effect*) antara IPM terhadap tingkat pengangguran signifikan, kemudian tingkat pengangguran terhadap kemiskinan juga signifikan, sehingga disimpulkan bahwa pengangguran dapat memediasi antara IPM dan kemiskinan. IPM dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui pengangguran sebesar 0.031

5. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan melalui pengangguran

Hubungan langsung (*direct effect*) antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran signifikan di tandai

dengan $p \text{ value} < 0.01$ (signifikansi 0.05), kemudian tingkat pengangguran terhadap kemiskinan juga signifikan pada $p \text{ value}$ 0.03 (signifikansi 0.05), sehingga disimpulkan bahwa pengangguran dapat memediasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui pengangguran sebesar 0.037.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka saran yang dapat direkomendasikan dari peneliti diantaranya:

1. IPM secara langsung (*direct effect*) berpengaruh signifikan terhadap naik turunnya tingkat kemiskinan sehingga pemerintah pusat maupun daerah, untuk selalu meningkatkan pembangunan manusia, dengan memerhatikan ketiga dimensi tersebut, terutama dibagian *skill*.
2. Pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan. Pengangguran juga merupakan variabel mediasi antara IPM terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi kemiskinan. Sehingga pemerintah harus dapat membuat lapangan pekerjaan bagi para angkatan kerja baru, para lulusan dapat terserap dengan baik. Selain itu, Pertumbuhan ekonomi harus dapat dirasakan oleh masyarakat miskin, dengan menciptakan lapangan kerja, bantuan modal, dan saluran sosial lainnya demi meningkatkan pendapatan.

3. Diharapkan melakukan peneliatan dengan menambah variabel independen, untuk mengetahui variabel apa saja yang sangat memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu variabel yang di teliti tidak hanya pengaruh dalam jangka panjang saja tapi juga memasukkan faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan dalam jangka pendek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiono. *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Agrawal, Pradeep. "Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence From Kazakhstan". *Asean Development Review*, 24.2, (2008). 90-115. diakses 8 Maret 2018. <http://www.adb.org>.
- Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Al-Baihaqi, Sya'bul Imān, Juz 7, *Maktabah Syāmilah*, 232
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Arini & Made Dwi Setyadhi Mustika. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, ISSN: 2303-0178, 4.9 (2015) : 1140-1163. Diakses 12 April 2018. <https://ojs.unud.ac.id>.
- Ash-Shiddieqie, Teungku Hasby. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Badan Pusat Statistik. "Indeks Pembangunan Manusia". Diakses 13 April 2018. <http://ipm.bps.go.id>
- _____. "Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007 –2017". Diakses 11 April 2018. <https://www.bps.go.id>
- _____. "Kemiskinan dan Ketimpangan". Diakses 25 Maret 2018. <https://www.bps.go.id>.

_____. “kemiskinan-dan-ketimpangan”. Diakses 10 April 2018. <https://www.bps.go.id>

_____. “Laju Pertumbuhan PDB / PDRB”. Diakses 25 Maret 2018. <https://Sirusa.Bps.Go.Id>

_____. *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*. Badan Pusat Statistik: 2009.

Badan Pusata Statistik Kabupaten Sambas, “Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Sambas 2015”, diakses 19 Maret 2018, <https://www.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar. “IPM Tahun 2015”. Diakses 3 Januari 2018. <https://kalbar.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik, *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016*. Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2016. diakses 19 Maret 2018, <https://www.bps.go.id>.

Baihaqi, *Sya’bul Imān, Maktabah Syāmilah*.

_____, *Al-Ādāb Li Al-Baihaqī*, Maktabah Islamweb

Beik, Irfan Syauqi & Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Bourguignon, François. “The Poverty-Growth-Inequality Triangle”. NewDelhi: Research On International Economic Relations, 2004. Butar-Butar, Tumpal. “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Simalungun” Lapoan Hasil Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen Medan, 2013. Diakses 12 April 2018. <https://perpustakaan.uhn.ac.id>.

- Cahya, Bayu, Tri, “Kemiskinan Ditinjau dari Perpekstif Al-Quran dan Hadis”, *Jurnal Penelitian*, 9 (2015): 41-66. Diakses 12 April 2018. [Http://journal.stainkudus.ac.id](http://journal.stainkudus.ac.id).
- Capra, Umar. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid Al Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008.
- Darman, Okun, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran: Analisis Hukum”. *Journal The Winners*, 14.1 (2013): 1-12. Diakses 10 April 2018. Journal.Binus.Ac.Id.
- Endrayani, Ni Ketut Eni & Made Heny Urmila Dewi. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”. *ISSN : 2337-3067, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.1 (2016) : 63-88. Diakses 12 April 2018, <https://ojs.unud.ac.id>.
- Firmansyah, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas Menurut Pengeluaran 2011- 2015*. Sambas: Badan Pusat Statistik Sambas, 2016.
- Gazalba, Sidi. *Ilmu Islam: Asas Agama Islam*, cetakan ke- 2. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985.
- Herwanti, Titiek & Muhammad Irwan, “Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 17.2 (2013): 131-1154. Diakses 13 April 2018. doi: <http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.2235>, (131 - 1154)
- HM, Muhdar. “Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi”. *Jurnal Al-Buhuts*, ISSN 1907-0977 E ISSN 2442-823X, 11 (2015) : 42-66. Diakses 22 Juni 2017. [Https://scholar.google.com](https://scholar.google.com).

Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Premadei Group, 2015.

Irpan, Hamidah Muhd dkk. "Impact of Foreign Direct Investment on The Unemployment Rate in Malaysia". *Journal of Physics: Conference Series*, 7.10 (2016) : 1-10. Diakses 10 April 2018. Doi:10.1088/1742-6596/710/1/012028. <http://iopscience.iop.org>.

Jabbār, Sahīb ‘Abdul. *Al-Jāmi’ushshahīh Lissunan Wal Masānīd Juz 6*, Maktabah Syamilah, 2014.

Jhingan M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali, 2016.

Jmaliah & Muhammad Said, " The Effect of Employment Development Index on Economic Growth and Poverty level in Indonesia", *Problem and Perspectives in Management*, 15. (2017): 364-371. Diakses 8 April 2018. [Http://dx.doi.org](http://dx.doi.org).

Jumika. "Analisis Pengaruh PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (Analisis Data Panel terhadap 35 Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009)". Tesis, Program Pascasarjana Megister Ekonomi dan Studi Pembangunan Surakarta, 2012.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Alquran al-Adzhim*, juz 4. Maktabah Syamilah, 1999.

-----*Tafsir Al-qur’ān al-‘Ādzhīm*, Juz 2. 222. Maktabah Syāmilah.

Kemenkeu. "Anggaran Kemiskinan 2009-2014". Diakses 11 April 2018. [Http://www.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.anggaran.kemenkeu.go.id).

- Kumolo, Tjahjo. “Buku Induk Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Seluruh Indonesia”, 2014 Diakses 12 April 2018. [Http://Www.Kemendagri.Go.Id](http://Www.Kemendagri.Go.Id)
- Latan, Hengky dan Imam Ghazali. *Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program Warppls 5.0*. UNDIP, Semarang, 2017.
- Latifah, Nenny dkk. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Dampaknya Pada Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Manado”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17.2 (2017): 10-117. Diakses 12 April 2018. [Https://ejournal.unsrat.ac.id](https://ejournal.unsrat.ac.id)
- Lumbantoruan, Eka Pratiwi & Paidi Hidayat. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi)”. *HidayatJurnal Ekonomi dan Keuangan*, .2.2 (2014): 14-27, Diakses 13 April 2018. [Https://media.neliti.com](https://media.neliti.com).
- Made Parwata, dkk. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan”. *Jurnal Jurusan Manajemen*, 4.1 (2016): 1-10. Diakses 12 April 2018. Download.portalgaruda.org.
- Maipita, Indra. *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Mankiw, Gregory dkk. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Mishriy, Abū ‘abdillāh Muhammad ibn salāmah ibn Ja’far ibn ‘Alī ibn Hukmūn al-Qadhā’ī, *Musnad al-Syihāb*, Maktabah Syamilah.

- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Murtadho, Ali. *Formulasi Konsep Islam tentang Pembangunan Ekonomi Padat Penduduk (Analisis Pemikiran Fahm Khan)*. DIPA IAIN Walisongo, Semarang, 2014.
- _____. “Solusi Problem Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 28 (2008) : 167-189. Diakses 5 April 2016. <https://independent.academia.edu/mohammedniam>.
- Mustamin, Siti Walida dkk. “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”. *Jurnal Analisis, Desember, Issn 2303-100x* 4. 2 (2015) : 165 – 173, diakses 12 April 2018, pasca.unhas.ac.id
- Neolaka, Amos. *Metode Penelitian Dan Statistik*. Bandung: Pt Remaja Rosdakary, 2014.
- Ngurah , Anak Agung & Agung Kresnandra, “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3.2(2016): 44-63. Diakses 30 Maret 2018. [Http://jurnal.unmer.ac.id](http://jurnal.unmer.ac.id).
- Nisābūrī, Muslim Ibn Hajjāj Abulhasan Alqusyairī. *Shahīh Muslim Juz 5. Maktabah Syāmilah*
- Nurmainah, Santi. “Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah ,Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah)”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 20.2, (2013) : 131-141. Diakses 12 April 2018. <https://media.neliti.com>.

- Paseki, Meilen Greri dkk. “ Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14.3 (2014) : 30-42. Diakses 25 Maret 2018. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Pattimahu, Terezia V. “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Maluku “. *ISSN: 1978-3612*, X.1, (2016) : 40-48. Diakses 13 April 2018. <https://ejournal.unpatti.ac.id>
- Permana Anggit Yoga & Fitri Arianti. “Analisis Pengaruh Pdrb, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009”. *Diponegoro Journal Of Economics*, 1.1, (2012): 1-8. Diakses 13 April 2018. <https://media.neliti.com>
- Poyoh, Arfan dkk . “Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Utara”, *Agri-SosioEkonomiUnsrat,ISSN 1907– 4298* , 13.1A (2017) : 55-66. Diakses 8 April 2018. <https://media.neliti.com>.
- Prawoto, Nano. “Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9.1, (2009): 56-68. Diakses 12 April 2018. <https://scholar.google.co.id>.
- Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam dalam Mengentasi Kemiskinan*. Terj. Syafril Halim. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- *Musykilatul Faqr Wa Kaifa ‘Alijahal Islām*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1985.
- Ririn Tri Puspita Ningrum, “Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia”. *ENGAGEMENT Jurnal Pengabdian Kepada*

Masyarakat This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA ISSN : 2579-8375, 1, (2017): 77-110. Diakses 12 April 2018. <https://scholar.google.co.id>.

Riza Firdhania dkk. “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember.”. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, IV (1) (2017),: 117-121. Diakses 9 April 2018. <https://jurnal.unej.ac.id>.

Sadeq, A.H.M. “Economic Development in Islam”, *Jurnal of Islamic Economics*, I. 1 (1987): 35-45. Diakses 13 April 2018. [Journals.iium.edu.my](https://journals.iium.edu.my).

Sarwono, Jhonatan. “Memadukan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif: Mungkinkah?”. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 9.2 (2009): 119-132. Diakses 30 Maret 2018. <https://media.neliti.com>.

Septiatin, Aziz & Mawardi , Mohammad Ade Khairur Rizki, “Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. *I-Economic* ,2.1(2016): 51-65. Diakses 12 April 2018. [Jurnal.radenfatah.ac.id](http://jurnal.radenfatah.ac.id)

Siregar, Selamat. “Pengaruh Pdrb Riil dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan Dengan Variabel Intervening Pengangguran”, *Jurnal Ilmiah Methonomi* 3.2 (2017): 61-72. Diakses 10 April 2018. <https://scholar.google.co.id>.

Sodeq, Ahmad. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”. *Equbilirium*. 3.2 (2015): 380-405. Diakses 12 April 2018. <http://journal.stainkudus.ac.id>

Sofilda, Eleonora et al., “Human Development and Poverty in Papua Province (An Analysis of Simultaneous Approach on Panel Data Regression)”, *OIDA International Journal of Sustainable*

- Development* 06:06 (2013): 51-62. Diakses 6 April 2018.
[Http://www.oidajsd.com](http://www.oidajsd.com).
- Soleh, Ahmad. “Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2.2 (2014) : 197-209. Diakses. [Http://jurnal.unived.ac.id](http://jurnal.unived.ac.id) .
- Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar, edisi ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8.2 (2011) : 357-266. Diakses 12 April 2018. [Https://media.neliti.com](https://media.neliti.com).
- _____. “ Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri, dan Kemiskinan (Kajian Teoritis di Indonesia).” *Ekonomika-Bisnis*, 6.1, (2015): 89-106. Diakses 25 April 2018. DOI: <http://doi.org/10.22219/JIBE.vol6.No1.89-106>.
- The World Bank. “Poverty & Equity Data Portal”. Diakses 12 April 2018. [Http://povertydata.worldbank.org](http://povertydata.worldbank.org)
- Wargadinata, Wildana. *Islam & Pengentasan Kemiskinan*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Widarjono, Agus. *Analisis Multivariat Terapan Dengan Spss, Amos, Dan Smartpls*. Jogjakarta : UPP STIM YKPN, 2015.

Winarsunu, Tulus. *Statistik Dalam Penelitian Psikologi Dan Pendidikan*. Malang: Umm Pres, 2004.

Lampiran 1. Daftar garis kemiskinan di tiap Provinsi di Indonesia pada periode 2013-2017

Provinsi	Garis Kemiskinan Menurut Provinsi (Rupiah/kapita/bulan)									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Perkota-an	Pedesa-an	Perkota-an	Pedesa-an	Perkota-an	Pedesa-an	Perkota-an	Pedesa-an	Perkota-an	Pedesa-an
Aceh	374261	337962	396939	369232	420324	394419	445488	415826	479872	442869
Sumatera utara	330517	292186	349372	312493	379898	352637	413835	388707	438894	407157
Sumatera barat	360768	321252	390862	349824	423339	391178	454674	425520	475365	441415
Riau	366057	339829	386606	374466	417768	416780	439542	433960	474626	457368
Jambi	369835	280660	390931	302162	423855	329895	448615	349735	465233	366036
Sumatera selatan	328335	270166	346238	285791	378739	319994	400159	339874	417828	356020
Bengkulu	358294	313265	378881	346395	425642	404179	458435	427315	490475	449857
Lampung	326468	284504	350024	307818	386728	346088	398378	357792	427072	377049
Kep. Bangka belitung	416935	436899	458055	481226	516835	542732	553681	573582	595031	623111
Kep. Riau	405578	364773	431127	399063	485496	456933	505980	481687	540062	507795
Dki jakarta	434322	434322	459560	-	503038	-	520690	-	578247	-
Jawa barat	281189	268251	294700	285076	318297	319228	332145	331237	354866	353103

Jawa tengah	268397	256368	286014	277802	308163	310295	322799	322489	339692	337657
Di yogyakarta	317925	275786	333561	296429	359470	324386	370510	337230	413631	352861
Jawa timur	278653	269294	293391	286798	314320	318443	329241	328846	372585	347997
Banten	300109	264632	324902	296241	365672	336592	382903	351708	421137	373039
Bali	298449	261613	316235	279140	341554	314218	357427	328033	371118	350826
Nusa tenggara barat	299886	263107	315470	285205	335284	313466	346581	328775	363697	343387
Nusa tenggara timur	321163	234141	340459	251040	374355	290363	389661	310296	409382	329136
Kalimantan barat	280423	265898	307789	294044	347516	337288	366477	360940	401588	394313
Kalimantan tengah	299970	311647	316683	338130	339239	374938	357224	392543	378311	418861
Kalimantan selatan	313691	290576	336782	313954	371793	352972	399162	380647	434791	407382
Kalimantan timur	435313	389784	459004	420427	504551	476614	535137	510041	564801	554497
Kalimantan utara	-	-	-	-	505262	477645	539499	518305	595802	554548
Sulawesi utara	255566	245872	269212	264321	302378	311068	314004	322366	331931	340146

Sulawesi tengah	324072	293567	349978	321009	376496	353080	399413	376658	430728	400639
Sulawesi selatan	235488	207023	246416	219109	274140	254524	286669	267428	303834	287788
Sulawesi tenggara	240089	221905	254015	238745	282230	264371	294286	276978	308624	295496
Gorontalo	237600	232048	250157	246290	274581	275163	287156	285999	312931	304353
Sulawesi barat	230973	228346	245959	246695	269080	279594	280117	295739	318376	315137
Maluku	358068	339466	369738	355478	404929	405502	424788	423698	461552	443565
Maluku utara	317176	281482	339561	307374	378538	356325	405368	379454	413797	390914
Papua barat	414900	389163	440241	423701	478699	457222	508262	480945	523381	499086
Papua	387789	322079	408419	340846	445057	392446	479294	425264	508403	446994
Indonesia	275779	275779	326853	296681	356378	333034	372114	350420	400995	370910

Lampiran 2. Data IPM, TPT, PE, pengangguran, dan Kemiskinan periode 2013-2017 di 33 provinsi di Indonesia yang digunakan dalam analisis penelitian yang diinput ke dalam WarpPLS mulai dari

IPM (%)	Pengangguran (%)	Kemiskinan (%)	Pertumbuhan ekonomi= PDRB (%)
68.3	10.12	17.72	2.61
68.36	6.45	10.39	6.07
68.91	7.02	7.56	6.08
69.91	5.48	8.42	2.48
67.76	4.76	8.42	6.84
66.16	4.84	14.06	5.31
67.5	4.61	17.75	6.07
65.73	5.69	14.39	5.77
67.92	3.65	5.25	5.2
73.02	5.63	6.35	7.21
78.08	8.63	3.72	6.07
68.25	9.16	9.61	6.33
68.02	6.01	14.44	5.11
76.44	3.24	15.03	5.47
67.55	4.30	12.73	6.08
69.47		5.89	6.67

	9.54		
72.09	1.83	4.49	6.69
63.76	5.30	17.25	5.16
61.68	3.25	20.24	5.41
64.3	3.99	8.74	6.05
67.41	3.00	6.23	7.37
67.17	3.66	4.76	5.33
73.21	7.95	6.38	2.76
69.49	6.79	8.5	6.38
65.79	4.19	14.32	9.59
67.92	5.10	10.32	7.62
67.55	4.38	13.73	7.5
64.7	4.15	18.01	7.67
61.53	2.35	12.23	6.93
66.09	9.91	19.27	5.24
64.78	3.80	7.64	6.36
60.91	4.40	27.14	7.36
56.25	3.15	31.53	8.55
68.81	9.02	16.98	1.55
68.87		9.85	5.23

	6.23		
69.36	6.50	6.89	5.88
70.33	6.56	7.99	2.71
68.24	5.08	8.39	7.36
66.75	4.96	13.62	4.79
68.06	3.47	17.09	5.48
66.42	4.79	14.21	5.08
68.27	5.14	4.97	4.67
73.4	6.69	6.4	6.6
78.39	8.47	4.09	5.91
68.8	8.45	9.18	5.09
68.78	5.68	13.58	5.27
76.81	3.33	14.55	5.17
68.14	4.19	12.28	5.86
69.89	9.07	5.51	5.51
72.48	1.90	4.76	6.73
64.31	5.75	17.05	5.17
62.26	3.26	19.6	5.05
64.89	4.04	8.07	5.03
67.77		6.07	6.21

	3.24		
67.63	3.80	4.81	4.84
73.82	7.38	6.31	1.71
69.96	7.54	8.26	6.31
66.43	3.68	13.61	5.07
68.49	5.08	9.54	7.54
68.07	4.43	12.77	6.26
65.17	4.18	17.41	7.27
62.24	2.08	12.05	8.86
66.74	10.51	18.44	6.64
65.18	5.29	7.41	5.49
61.28	5.02	26.26	5.38
56.75	3.44	27.8	3.65
69.45	9.93	17.11	-0.73
69.51	6.71	10.79	5.1
69.98	6.89	6.71	5.52
70.84	7.83	8.82	0.22
68.89	4.34	9.12	4.2
67.46	6.07	13.77	4.42
68.59		17.16	5.13

	4.91		
66.95	5.14	13.53	5.13
69.05	6.29	4.83	4.08
73.75	6.20	5.78	6.01
78.99	7.23	3.61	5.89
69.5	8.72	9.57	5.04
69.49	4.99	13.32	5.47
77.59	4.07	13.16	4.95
68.95	4.47	12.28	5.44
70.27	9.55	5.75	5.4
73.27	1.99	5.25	6.03
65.19	5.69	16.54	21.77
62.67	3.83	22.58	5.03
65.59	5.15	8.44	4.86
68.53	4.54	5.91	7.01
68.38	4.92	4.72	3.83
74.17	7.50	6.1	-1.21
70.39	9.03	8.98	6.12
66.76	4.10	14.07	15.52
69.15		10.12	7.17

	5.95		
68.75	5.55	13.74	6.88
65.86	4.65	18.16	6.22
62.96	3.35	11.9	7.39
67.05	9.93	19.36	5.48
65.91	6.05	6.22	6.1
61.73	8.08	25.73	4.15
57.25	3.99	28.4	7.47
70	7.57	16.43	3.31
70	5.84	10.27	5.18
70.73	5.09	7.14	5.26
71.2	7.43	7.67	2.23
69.62	4.00	8.37	4.37
68.24	4.31	13.39	5.03
69.33	3.30	17.03	5.3
67.65	4.62	13.86	5.15
69.55	2.60	5.04	4.11
73.99	7.69	5.84	5.03
79.6	6.12	3.75	5.85
70.05		8.77	5.67

	8.89		
69.98	4.63	13.19	5.28
78.38	2.72	13.1	5.05
69.74	4.21	11.85	5.55
70.96	8.92	5.36	5.26
73.65	1.89	4.15	6.24
65.81	3.94	16.02	5.82
63.13	3.25	22.01	5.18
65.88	4.23	8	5.22
69.13	4.82	5.36	6.36
69.05	5.45	4.52	4.38
74.59	7.95	6	-0.38
71.05	6.18	8.2	6.17
67.47	3.29	14.09	9.98
69.76	4.80	9.24	7.41
69.31	2.72	12.77	6.51
66.29	2.76	17.63	6.52
63.6	3.33	11.19	6.03
67.6	7.05	19.26	5.76
66.63		6.41	5.77

	4.01		
62.21	7.46	24.88	4.52
58.05	3.35	28.4	9.21
70.6	6.57	15.92	4.19
70.57	5.60	9.28	5.12
71.24	5.58	6.75	5.29
71.79	6.22	7.41	2.71
69.99	3.87	7.9	4.64
68.86	4.39	13.1	5.51
69.95	3.74	15.59	4.99
68.25	4.33	13.04	5.17
69.99	3.78	5.3	2.01
74.45	7.16	6.13	2.01
80.06	7.14	3.78	6.22
70.69	8.22	7.83	5.29
70.52	4.57	12.23	5.27
78.89	3.02	12.36	5.26
70.27	4.00	11.2	5.45
71.42	9.28	5.59	5.71
74.3		4.14	5.59

	1.48		
66.58	3.32	15.05	0.11
63.73	3.27	21.38	5.16
66.26	4.36	7.86	5.17
69.79	4.23	5.26	6.74
69.65	4.77	4.7	5.29
75.12	6.91	6.08	3.13
71.66	7.18	7.9	6.32
68.11	3.81	14.22	7.14
70.34	5.61	9.48	7.23
69.86	3.30	11.97	6.81
67.01	4.28	17.14	6.74
64.3	3.21	11.18	6.67
68.19	9.29	18.29	5.81
67.2	5.33	6.44	7.67
62.99	6.49	23.12	4.01
59.09	3.62	27.76	4.64

Sumber: BPS

Lampiran 3. Model fit.

|License end date: 03-Jul-2018
Project path (directory): F:\pls 6 april 2018\data 2013-2017\
Project file: data 2013-2017 diubah tpt.txt
Last changed: 22-Apr-2018 13:26:41
Last saved: Never (needs to be saved)
Raw data path (directory): F:\pls 6 april 2018\data 2013-2017\
Raw data file: data 2013-2017 diubah tpt.txt

Model fit and quality indices

Average path coefficient (APC)=0.279, $P < 0.001$
Average R-squared (ARS)=0.317, $P < 0.001$
Average adjusted R-squared (AARS)=0.307, $P < 0.001$
Average block VIF (AVIF)=1.104, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.498, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.563, small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36
Simpson's paradox ratio (SPR)=0.800, acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=0.930, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.900, acceptable if ≥ 0.7

Lampiran 4.

```
*****  
* Path coefficients and P values *  
*****
```

Path coefficients

	IPM	PGRN	PE	KMSKN
IPM				
PGRN	0.223		-0.266	
PE				
KMSKN	-0.709	0.138	0.057	

P values

	IPM	PGRN	PE	KMSKN
IPM				
PGRN	0.002		<0.001	
PE				
KMSKN	<0.001	0.035	0.230	

Lampiran 5

```
*****  
* Latent variable coefficients *  
*****  
  
R-squared coefficients  
-----  
  
IPM      PGRN      PE      KMSKN  
          0.151          0.482
```

Lampiran 6

* Indirect and total effects *

Indirect effects for paths with 2 segments

	IPM	PGRN	PE	KMSKN
IPM				
PGRN				
PE				
KMSKN	0.031		-0.037	

Total effects

	IPM	PGRN	PE	KMSKN
IPM				
PGRN	0.223		-0.266	
PE				
KMSKN	-0.678	0.138	0.020	

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : U. Sulia Sukmawati
2. Kelahiran : Padang Sukamara, 13 Januari 1985
3. Alamat : Jalan Raya Rambli Komplek Perumahan
Rumah Adenia I Blok A No.4, Desa Saing Rambli,
Kecamatan Sambas, Kalimantan Barat.
4. HP/Email : 081254504942/
urai_suliasukmawati@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 16 Sentebang (Tahun Lulus: 1997)
2. SMP : MTs Ushuluddin Singkawang (Tahun
Lulus: 2000)
3. SMA : MAN 2 Pontianak (Tahun Lulus: 2003)
4. Perguruan Tinggi : Sarjana (S1) Program Studi Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas
Tanjungpura Pontianak (Tahun Lulus:
2009)

Semarang, 28 Juni 2018

Mahasiswa,

U. Sulia Sukmawati
NIM: 1600108017